

BAB II

KRONOLOGI KERJA SAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA BIDANG MARITIM

Dalam Bab II penulis akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah kerja sama bidang maritim antara Indonesia dan Australia serta kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang maritim. Selanjutnya penulis akan menjelaskan permasalahan perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang kemudian dengan adanya permasalahan perbatasan tersebut menjadikan kedua negara sepakat untuk berkerjasama bidang maritim yang dituangkan dalam *Maritime Cooperation*. Selanjutnya penulis akan menjelaskan poin-poin penting dalam *MoU Joint Declaration on Maritime Cooperation* yang mendasari kerja sama Indonesia dan Australia bidang maritim (*Maritime Cooperation*).

Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam bidang maritim sudah dimulai sejak tahun 1971 dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 2017-2018 Indonesia dan Australia kembali melakukan kerja sama bidang maritim yang bertajuk *Maritime Cooperation*. Perjanjian kerja sama dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan masing-masing negara. Timbulnya permasalahan perbatasan maritim yang dihadapi antara Indonesia dan Australia, menjadikan kedua negara harus lebih efektif dalam menangani ancaman-ancaman maritim yang terjadi diperbatasan kedua negara.

2.1 Sejarah Hubungan Kerja sama Indonesia-Australia Bidang Maritim

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategi karena berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini yang menjadikan hubungan Indonesia dan Australia sangat dinamis. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Australia harus memiliki hubungan yang produktif dan saling mendukung di tingkat regional maupun internasional. Perbedaan budaya dan etnis antara Indonesia dan Australia tidak menjadi penghalang kedua negara untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih baik.²⁰

Kedua negara memiliki perbedaan diantaranya, pertama dibidang geografis, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan, sedangkan Australia merupakan negara kontinental. Kedua, dalam bidang demografis, Indonesia adalah negara terpadat ke empat di dunia dengan penduduk 260 juta jiwa sedangkan Australia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk kecil, hanya sekitar 25 juta penduduk. Ketiga, adanya latarbelakang kebudayaan, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim terbesar didunia sedangkan Australia berpenduduk mayoritas non muslim (Kristen). Meskipun begitu, kerjasama Indonesia dan Australia terus dilakukan melalui berbagai Perjanjian Keamanan antar kedua negara. Kerjasama tersebut dilakukan dalam upaya untuk mempererat hubungan dan kerja sama bilateral antara kedua negara. Selain itu, perbatasan maritim antara

²⁰ Tim Lindsey And Dave Mcrae, 2018, *Strangers Next Door? Indonesia And Australia in the Asian Century*, North America (Us And Canada), Oxford and Portland Oregon, hlm 31

Indonesia dan Australia menjadikan kedua negara memiliki hubungan bilateral yang semakin kompleks.²¹

Gambar 2.1 Perbatasan Maritim Indonesia-Australia.²²



Gambar diatas menunjukan wilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia dimana perbatasan kedua negara yang membentang dari Papua Nugini di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir di Samudera Hindia. Namun dewasa ini, perbatasan maritim Indonesia dan Australia sempat mengalami ketegangan dengan adanya klaim dari kedua negara terkait dengan Timor Leste. Ketegangan itupun berakhir dengan

²¹ M. Fathoni Hakim, 2010, *Perjanjian Keamanan Indonesia – Australia; Upaya Indonesia Untuk Mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur*, Jakarta, Universitas Indonesia

²² Maritime Boundary Office, diakses melalui <http://www.gfm.tl/learn/maps/> Pada Tanggal 02/09/2018 Pukul 12:20 AM

kesepakatan antara Australia dan Timor Leste mengenai perbatasan maritim di Laut Timor dan Indonesia menjadi pihak dalam proses rekonsiliasi antara Australia dan Timor Leste.²³

Sebagai negara kepulauan Indonesia merasa sangat penting untuk terus melakukan kerja sama dengan Australia, mengingat negeri Kangguru beberapa kali telah melakukan intervensi kebijakan Indonesia. Dari sudut pandang Australia, Indonesia memiliki posisi yang strategis sehingga hal ini sangat penting bagi Australia dalam hubungannya dengan Asia Timur dan Asia Selatan, dan mempunyai peranan yang besar di Asia, khususnya Asia Tenggara. Dalam bidang maritim, Indonesia dan Australia memiliki banyak persamaan kepentingan baik dalam konteks pengelolaan kekayaan alam, maupun pengamanan dan penegakan hukum di wilayah maritim. Puluhan tahun perundingan terkait Hukum Laut Internasional, dan kepentingan kedua negara sering sejalan.²⁴

Indonesia dan Australia juga berbagi perbatasan di Samudera Hindia tepatnya di wilayah seberang laut Australia Pulau Natal (*Christmas Island*) dan Pulau Jawa di Indonesia. Pulau Natal (*Christmas Island*) merupakan sebuah pulau yang dulunya didapatkan oleh penjelajah laut asal Inggris. Pulau ini memiliki luas 140 kilometer persegi dengan populasi sekitar 2000. Dewasa ini, pulau tersebut menjadi jalur keluar masuknya Imigran gelap.²⁵

²³ *Ibid*

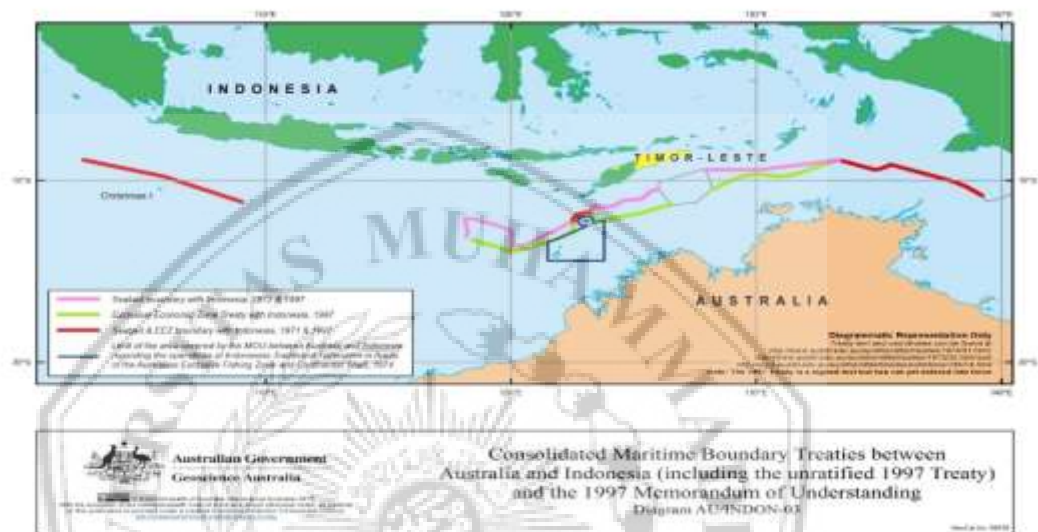
²⁴ Australia's International Maritime Boundaries, diakses melalui <https://www.petroleum-acreage.gov.au/sites/prod.petroleumacreage/files/files/2018/basic/australia%e2%80%99s%20international%20maritim%20boundaries.pdf> Pada Tanggal 31/08/2018 Pukul 8:59 AM

²⁵ Victor Prescott, 2007, *The Completion Of Marine Boundary Delimitation Between Australia And Indonesia*, Jurnal Geopolitics And International Boundaries Vol 2, No 2, hlm 133

Australia dan Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian dan pengaturan yang berkaitan dengan wilayah maritim antara Australia dan Indonesia termasuk Wilayah Australia yaitu Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah pertama, perjanjian antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Batas Dasar Laut Tertentu (Kesepakatan Dasar Laut 1971). Kedua, Perjanjian antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Batas Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Laut Arafura. Ketiga, Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Operasi Nelayan Tradisional Indonesia di Area Zona Pemancingan Eksklusif Australia dan Landas Kontinen, 7 November 1974 (MoU). Keempat, Nota Kesepahaman (MoU) Sementara Pengawasan Perikanan dan Penegakan Line, 29 Oktober 1981 (PFSEL) dan yang kelima, Perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas Dasar Laut Tertentu (Perth, 14 Maret 1997) (Perjanjian 1997 Perth). Perjanjian ini sudah ditandatangani akan tetapi belum diberlakukan.²⁶

²⁶ *Ibid*

**Gambar 2.2 Konsolidasi Perjanjian Perbatasan Maritim
antara Australia dan Indonesia dan Nota Kesepahaman
1971.²⁷**



Gambar diatas menyajikan adanya kesepakatan bidang maritim juga terjadi anantara Indonesia dan Australia pada tahun 1971 dan 1972 dalam menetapkan batas dasar laut antara Indonesia dan Australia di Laut Arafura dan Laut Timor. Perjanjian Perth akhirnya ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1997, dalam rangka menetapkan Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan batas dasar laut. Nota Kesepahaman Australia-Indonesia 1974 tentang Operasi Tradisional Indonesia Nelayan di Area Zona Pemancingan Eksklusif Australia dan Landas Kontinen (MoU). Secara khusus, Australia setuju untuk tidak menerapkan

²⁷ *Ibid*

undang-undang perikanan terhadap nelayan Indonesia yang melakukan operasi pemancingan mereka sesuai dengan MoU.²⁸

Berdasarkan sejarahnya, hubungan bilateral kedua negara kerap diwarnai dengan kecurigaan antar dua belah pihak. Hal ini dimulai dengan adanya program peningkatan kemampuan militer oleh Indonesia pada tahun 1960. Kejadian ini menyebabkan militer Indonesia ditakuti dikawasan Asia Selatan termasuk Australia. Pada saat itu, Australi terus mencemaskan keberadaan Indonesia yang cenderung ekspansi karena Indonesia telah melancarkan operasi Trikora dan Dwikora. Perselisihan selanjutnya berkaitan dengan masalah Timor Leste (sebelumnya Timur-Timor), pengungsi, pers, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat Australia kerap menuding Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste.²⁹

Guna memulihkan kembali hubungan antara Indonesia dan Australia, dibutuhkan sebuah komitmen dalam bentuk perjanjian kerjasama yang saling menghormati eksistensi kedua negara, salah satunya melalui Perjanjian Lombok (*Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation 2006*) yang telah ditandatangani di Lombok, pada November 2006. Perjanjian keamanan Traktat Lombok ditandatangani pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kerja sama keamanan antara kedua negara sudah dimulai, dimana pada saat itu Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke

²⁸ *Ibid*

²⁹ W Saroinsong, 2015, *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation 2006*, Journal Of International Law, Vol 5, No 3

Australia tepatnya setahun setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I. Susilo Bambang Yudhoyono memfokuskan kerja sama tersebut dengan tujuan untuk dapat memberantas ancaman keamanan yang bersifat tradisional maupun non-tradisional sehingga kedua negara perlu meningkatkan kerja sama yang lebih efektif. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden Republik Indonesia, akhirnya mengagas *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic of Indonesia and Australia*.³⁰

Dalam deklarasi tersebut menyebutkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama memiliki komitmen dalam memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, teknis, kerja sama keamanan dan meningkatkan hubungan interaksi antar masyarakat. Deklarasi ini juga menyebutkan kerja sama kedua negara penting untuk memberantas terorisme yang menjadi perhatian bersama terutama setelah terjadinya Bom Bali I pada tahun 2002. Oleh sebab itu kedua negara sepakat dalam melakukan kerja sama untuk meningkatkan kapabilitas kepolisian, pertukaran informasi intelijen dan kerja sama imigrasi juga bea cukai. Terlepas dari itu, kerja sama kedua negara dalam bidang maritim juga menjadi fokus utama dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang hingga saat ini banyak melalui jalur laut kedua negara.³¹

Selain itu, adapun forum Indonesia dan Australia bidang maritim yang menjadi titik kumpul kedua negara untuk membahas tentang pertahanan keamanan kedua negara. Forum-forum tersebut adalah *Defence Strategic*

³⁰ Taruna Rastra Sakti, 2016, *Kerja Sama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia Dan Australia*, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun IX, No 1, hlm 101

³¹ *Ibid*

Dialogue (IADSD), forum ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan potensi kerja sama pertahanan kedua negara. Selain meningkatkan kerja sama juga mereview keefektifan kerja sama kedua negara yang sudah dilaksanakan selama ini sehingga, kerja sama yang dilakukan saling menguntungkan. Forum IADSD merupakan forum dialog yang dilakukan Indonesia dan Australia setiap tahunnya dan dihadiri oleh delegasi masing-masing negara.³²

Indonesia-Australia High Level Committee (Ausindo HLC), merupakan forum untuk kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam rangka memerangi ancaman keamanan maritim yang terjadi dikawasan kedua negara. Forum ini menjadi sebuah peluang untuk kedua negara melakukan diskusi yang lebih intens terkait bagaimana Indonesia dan Australia bisa bekerjasama dalam rangka menghadapi ancaman global dan keamanan yang mempengaruhi kedua negara.³³

Dalam bidang keamanan maritim, Indonesia juga menjalin mitra kerjasama dengan negara-negara dalam lingkup ASEAN maupun negara-negara lainnya. Indonesia menjadi negara yang kritis dalam keamanan maritim. Rute laut Indonesia yang strategi bukan hanya menyimpan keuntungan bagi Indonesia tetapi juga menyimpan ancaman bagi potensi maritim Indonesia. Hal ini menjadikan

³² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016, *Indonesia-Australia Perkuat Kerjasama Pertahanan*, diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2016/09/22/indonesia-australia-perkuat-kerjasama-pertahanan.html> Pada Tanggal 31/08/2018 Pukul 11:45 AM

³³ Anggaraman Saragih, 2018, *Sidang Indonesia-Australia High Level Committee (Ausindo HLC)*, diakses melalui <https://jakartagreater.com/sidang-australia-indonesia-high-level-committee-ke-6/> Pada Tanggal 31/08/2018 Pukul 12:45 PM

Indonesia sebagai pemain penting dalam keamanan maritim karena laut Indonesia sangat penting untuk jalur perdagangan global.³⁴

Berikut ini adalah tabel Kerjasama Indonesia dengan negara-negara dalam lingkup ASEAN dan negara-negara mitra kerjasama bidang maritim lainnya.

Tabel 2.1 All Cooperation Cases.³⁵

Outcome	Subject on Cooperation	
	Maritime Cooperation	Parties
Cooperation	The U.S.-Indonesia Defence Framework Arrangement, 10 June 2010	Indonesia and the U.S
	The Indonesia-Japan Joint Announcement on Fighting against International Terrorism, 24 June 200	Indonesia and Japan
	Three Bilateral Arrangements with Australia Australia (MoU on Counter-Terrorism, 7 February 2002; Lombok Treaty, 13 November 2006; and the Defence Cooperation Arrangement, 5 September 2012)	Indonesia and Australia
	The Brunei Darussalam-Indonesia- Malaysia- The Philippines East ASEAN Growth Area MoU on Sea Linkages, 2 November 2007 and the MoU on Transport of Goods, 25 June 2009	Indonesia, Brunei Malaysia and the Philippines
	The Agreement on Information	Indonesia, Malaysia and the

³⁴ Senia Febrica, 2017, *Maritime Security and Indonesia Cooperation, Interests and Strategies*, London & New York, Routledge, hlm 2-3

³⁵ Senia Febrica, 2014, *Explaining Indonesia's Participation in Maritime Security Cooperation*, diakses melalui <http://theses.gla.ac.uk/5429/1/2014febricaphd.pdf> Pada Tanggal 31/08/2018 Pukul 3:53 PM

	Exchange and Establishment of Communication, 7 May 2002	Philippines
	The ASEAN Convention on Counter-Terrorism, 13 January 2007	ASEAN member states (10 states)
	The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, 12 December 2002	148 states who are contracting parties to the Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention including ASEAN and non ASEAN states
	The World Customs Organization SAFE Framework of Standards (WCO SAFE Framework), 23 June 2005	164 out of 179 WCO member states including ASEAN and non-ASEAN state
	The Asia-Pacific Economic Cooperation Trade Recovery Programme (APEC TRP), 9 September 2007	7 ASEAN member states and 14 extra-regional states
Non-Cooperation	The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention), 10 March 1988	6 ASEAN States and 155 non ASEAN states
	The Proliferation Security Initiative (PSI), 31 May 2003	3 ASEAN states and 69 others extra-regional states
	The Container Security Initiative (CSI), 20 January 2002	3 ASEAN states and 33 extra regional states
Outcome	Armed Robbery against Ships	Parties
Cooperation	Indonesia-Singapore Coordinated Patrol Arrangement, 8 July 1992	Indonesia and Singapore
	Indonesia-Malaysia Coordinated Patrol Arrangement, July	Indonesia and Malaysia

	1992.	
	Indonesia-the Philippines Defence Agreement, 27 August 1997	Indonesia and the Philippines
	Indonesia-India Defence Agreement, 11 January 2001	Indonesia and India
	The MoU on Maritime Cooperation between Indonesia and China, 25 April 2005	Indonesia and China
	The Malacca Straits Patrol (MSP) Agreement, 21 April 2006.	Indonesia, Malaysia and Singapore
	Two ASEAN Initiatives (The ARF Statement on Cooperation against Piracy and Other Threats to Maritim Security, 17 June 2003 and the ASEAN Maritime Forum, 23 July 2005	ASEAN member states and 16 extra-regional states including the U.S., China, European Union and Australia
Non-Cooperation	Defence Cooperation Agreement with Singapore, 27 April 2007	Indonesia and Singapore
	The Regional Maritime Security Initiative (RMSI), November 2004	It was intended to include all 20 countries in East Asia and Pacific
	The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), 11 November 2004	ASEAN member states (excluding Malaysia and Indonesia) and 11 extra regional states

2.2 Permasalahan Perbatasan Maritim Antara Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia menjadi mitra strategi dalam bidang maritim hal ini dipengaruhi oleh letak kedua negara yang cukup dekat. Indonesia memiliki

kepentingan strategis yang penting bagi Australia. Negara keempat terpadat didunia, demokrasi terbesar ketiga dan populasi islam terbesar dan menjadi salah satu negara tetangga terdekat Australia. Indonesia akan selamanya menjadi penjaga gerbang Australia dan Asia. Rute laut dan udara menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Australia dan kemakmuran masyarakat. Meningkatnya kerja sama perdagangan dan keamanan telah terbukti mengurangi ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Pentingnya Indonesia bagi keamanan Australia menjadikan kedua negara terus mengembangkan hubungan keamanan yang kuat terutama dalam bidang maritim. Dalam bidang maritim Indonesia dan Australia bukan hanya memiliki visi atau tujuan yang sama akan tetapi kedua negara juga memiliki permasalahan perbatasan yang relatif sama seperti Human Trafficking, Illegal Fishing, Illegal Imigrant, Drugs Trafficking, People Smuggling, dan Terrorism. Permasalahan perbatasan tersebut tergolong dalam kejahatan transnasional (*Transnasional Crime*).³⁶

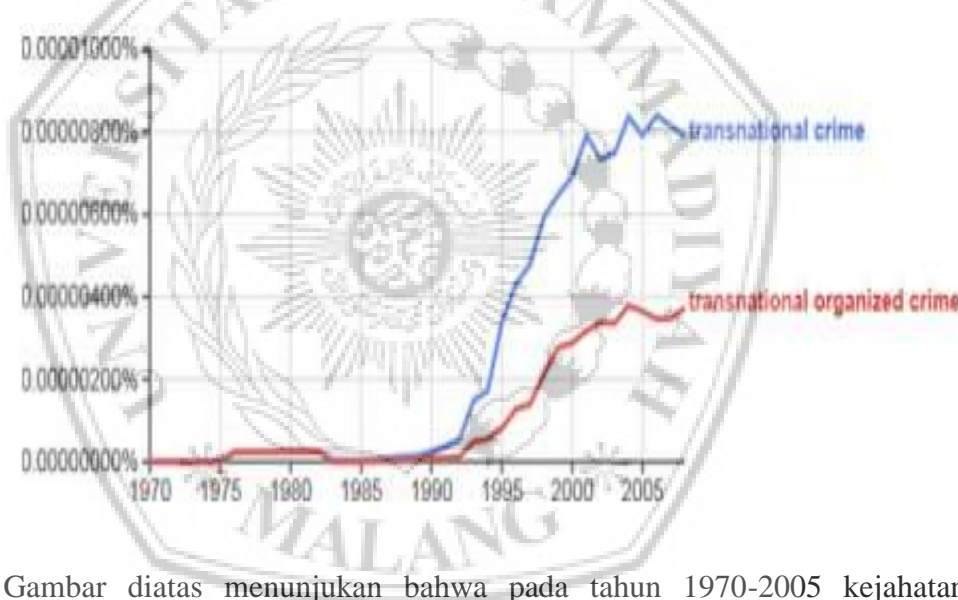
Kejahatan transnasional dipahami sebagai kejahatan yang terjadi di perbatasan dua negara atau lebih. Defenisi lain tentang Kejahatan transnasional atau disebut juga dengan kejahatan lintas negara adalah aktivitas yang dilakukan di seluruh dunia dengan menghasilkan keuntungan yang besar.³⁷ Kejahatan transnasional mungkin bukan fenomena baru, tetapi telah berkembang dan menyebar secara

³⁶ Bradley Wood, *The Implications Of A Rising Indonesia for Australia in the Asian Century*, diakses melalui <https://www.regionalsecurity.org.au/resources/files/20162211wood.pdf> Pada Tanggal 13/09/2018 Pukul 8:42 AM

³⁷ Transnational Crime, diakses melalui <http://internationalrelations.org/transnational-crime/> Pada Tanggal 15/09/2018 Pukul 9:56 PM

luas. Dalam aksi kejahatan transnasional, akan melibatkan orang, tempat dan institusi, yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Akibatnya, berbagai negara memiliki perbedaan definisi terkait kejahatan transnasional. Menurut Martin dan Romano kejahatan transnasional dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara.³⁸

Gambar 2.3 Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Dunia Pada Tahun 1970-2005.³⁹



Gambar diatas menunjukan bahwa pada tahun 1970-2005 kejahatan transnasional dan kejahatan transnasional terorganisir di dunia mengalami peningkatan terutama pada kejahatan transnasional (*Transnational Crime*). Peningkatan kejahatan transnasional sendiri mencapai 800% sedangkan kejahatan transnasional terorganisir 400%. Hal ini menunjukan bahwa kejahatan

³⁸ Peng Wang, 2009, *Transnational Crime: Its Containment Through International Cooperation*, diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/f046/90614bdfc8a0b0ad477fbf9d1fbad75693af.pdf> Pada Tanggal 15/09/2018 Pukul 10:10 PM

³⁹ Beth A. Simmons, 2018, *The Global Diffusion Of Law: Transnational Crime and The Case Of Human Trafficking*, International Organization Journal Vol 27, No 2, hlm 7

transnasional maupun kejahatan transnasional terorganisir akan terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya zaman. Adanya aspek ekonomi, social dan lingkungan yang mempengaruhi apa yang terjadi diperbatasan maritim yang salah satunya adalah kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional menjadi masalah serius bagi seluruh negara yang ada didunia. Masing-masing negara terus meningkatkan keamanan guna menghadapi ancaman-ancaman dari kejahatan transnasional.⁴⁰

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang dewasa ini mengalami dampak dari kejahatan transnasional. Berbagai kejahatan transnasional yang terjadi, memberikan dorongan terhadap Indonesia dan Australia untuk bekerjasama guna mengatasi ancaman kejahatan tersebut. Selain memiliki letak yang strategi, Indonesia dan Australia juga menjadi mitra penting dalam menjalin hubungan bilateral terutama dalam bidang maritim. Letak strategi yang dimiliki Indonesia dan Australia menjadikan kedua negara rentan mengalami ancaman kejahatan transnasional. Dalam kerja sama maritim (*Maritime Cooperation Plan Of Action*) kejahatan transnasional menjadi fokus utama bagi Indonesia dan Australia. Adapun Kejahatan transnasional yang marak terjadi diperbatasan kedua negara adalah Illegal Fishing, Human Tracffiking, Imigran Illegal, Drugs Tracffiking, dan Terrorism.

2.2.1 People Smuggling

⁴⁰ *Ibid*

People Smuggling atau biasa disebut dengan penyelundupan manusia adalah kejahatan lintas batas negara dan telah menjadi masalah serius di banyak negara didunia seperti Asia Tenggara, Asia Barat, Eropa, dan Australia, merasakan dampak dari kejahatan tersebut. Kejahatan penyelundupan manusia umumnya, tidak hanya melibatkan agen penyelundupan dan orang yang diselundupkan, tetapi dalam prakteknya, petugas penegak hukum suatu negara juga mengambil bagian dalam kejahatan tersebut, karena agen penyelundupan akan melakukan segalanya termasuk menyuap dan bekerja sama, sebagai sindikat, dengan agen negara yang tidak bermoral, untuk mencapai kesuksesan dalam operasi kriminal mereka.⁴¹

Penyelundupan manusia melibatkan masuknya orang secara ilegal ke wilayah suatu negara di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Masuknya orang secara ilegal berarti melintasi perbatasan negara tanpa mematuhi peraturan atau izin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Penyelundupan manusia telah menjadi kejahatan lintas batas yang lebih intensif dibandingkan dengan kejahatan lintas batas lainnya seperti perdagangan manusia, karena dalam kasus ini, agen penyelundupan tidak aktif dalam melakukan kejahatan tersebut, tetapi yang aktif adalah orang yang ingin diselundupkan ke negara tertentu.⁴²

Motivasi utama dalam kegiatan kejahatan penyelundupan manusia adalah imbalan finansial yang cukup menggiurkan. Kejahatan penyelundupan tetap dilakukan meskipun hal ini memiliki resiko mendapatkan hukuman dalam jangka

⁴¹ Nurul Miqat, 2018, *The Practice Of People Smuggling In Indonesia: Draconian Laws For A Better Life*, International Journal Of Global Community Vol 1, No 2, hlm 98

⁴² *Ibid*

waktu panjang, akan tetapi hukuman tersebut nampaknya lebih ringan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan penyelundupan manusia. Kejahatan penyelundupan manusia telah terhubungan dengan sindikat kriminal lainnya seperti Narkotika dan Perdagangan Senjata. Para penyelundup memfasilitasi masuknya orang-orang ke negara tujuan dengan menyediakan transportasi, akomodasi transit serta paspor palsu.⁴³

The smuggling of people is defined as:

*“The procurement, in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit, of a person into a state Party of which the person is not a national or a permanent resident.” Protocol against the Smuggling Of Migrants By Land, Sea and Air.*⁴⁴

Penyelundupan manusia didefinisikan sebagai pegandaan untuk memperoleh secara langsung maupun tidak langsung keuangan atau keuntungan material lainnya, dari masuknya orang yang tidak sah ke suatu negara yang dimana orang tersebut bukan warga negara tetap. Kejahatan penyelundupan manusia hanya bisa terjadi secara internasional. Satu-satunya tujuan dari penyelundupan manusia adalah masuknya seseorang secara illegal yang berniat ke suatu negara dimana orang tersebut tidak memiliki hak tinggal yang sah. Dalam kasus penyelundupan manusia, yang menjadi tugas para penyelundup adalah sekedar melintasi para migran ke perbatasan suatu negara dan selanjutnya para

⁴³ Ahmad Almaududy Amri, 2015, *People Smuggling In Southeast Asia: Trends, Challenges and Way Forward*, Australia, Routledge, hlm 1-2

⁴⁴ Brian Iselin and Melanie Adams, 2003, *Distinguishing Between Human Trafficking And People Smuggling*, diakses melalui <https://www.embraceni.org/wp-content/uploads/2006/06/distinguishing111.pdf> Pada Tanggal 07/09/2018 Pukul 8:27 PM

migran yang akan menjalankan aksi mereka ataupun menemukan jalan mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial.⁴⁵

Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) telah muncul sebagai salah satu bentuk ancaman kejahatan transnasional terutama dalam bidang maritim. Wilayah maritim menjadi salah satu jalur kejahatan penyelundupan manusia. Kejahatan penyelundupan manusia terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan manusia adalah konsekuensi ekonomi, dimana sebuah negara tidak dapat memberikan kesempatan atau lapangan kerja yang baik bagi warga negaranya sehingga di negara tersebut memiliki tingkat pengangguran yang tinggi hal tersebut yang mendorong warga negaranya untuk pindah ke negara lain guna mendapatkan pekerjaan yang aman dan layak.⁴⁶

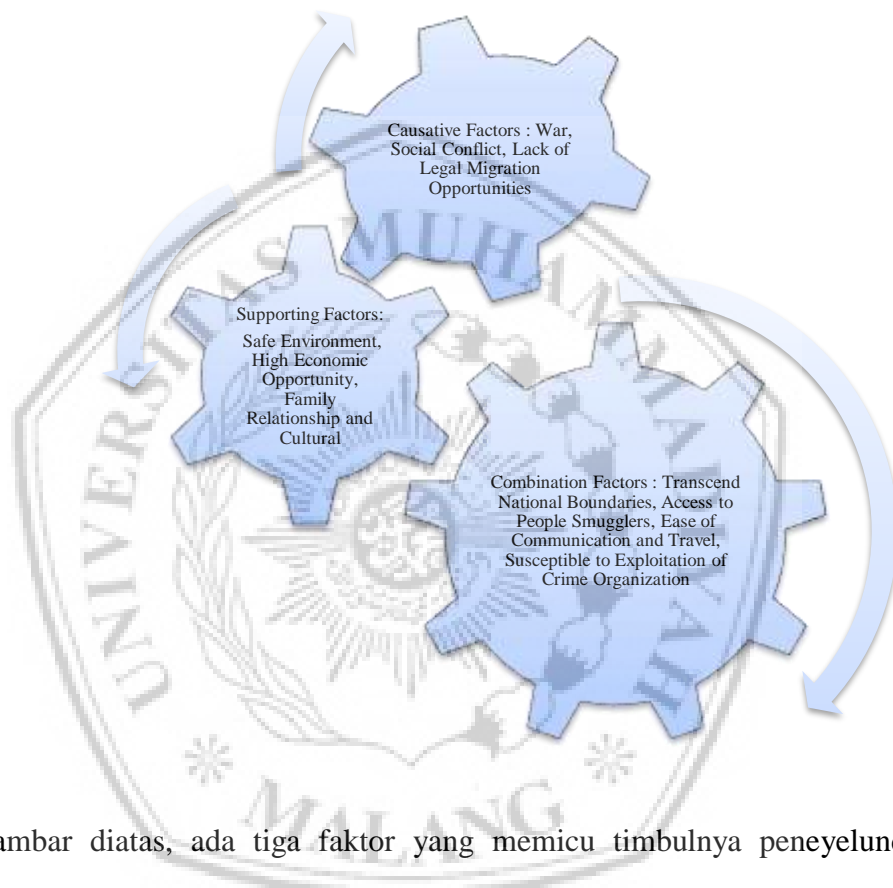
Selain faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia (*People Smuggling*), faktor konflik internal yang terjadi disuatu negara juga dapat memicu perpindahan penduduk karena konflik yang berkepanjangan tanpa akhir atau peperangan yang akan menyebabkan masyarakat di negara tersebut mengalami kemiskinan dan penganguaran. Perang atau konflik yang terjadi biasanya dikaitkan dengan masalah politik, keamanan, etnis, agama dan lain-lain yang terjadi di negara tersebut. Dalam kasus ini, konflik menjadi faktor utama yang mendorong para imigran untuk meninggalkan negara asal mereka atau

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam, Tan Kamello, *People Smuggling Indonesia*, diakses melalui [http://www.aessweb.com/pdf-files/ijass-2014-4\(11\)-1092-1099.pdf](http://www.aessweb.com/pdf-files/ijass-2014-4(11)-1092-1099.pdf) Pada Tanggal 13/09/2018 Pukul 9:20 PM

berpindah ke negara lain, guna mencari keamanan atau setidaknya menjauh dari konflik yang terjadi.⁴⁷

Gambar 2.4 Faktor Pemicu Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*).⁴⁸



Gambar diatas, ada tiga faktor yang memicu timbulnya peneyelundupan manusia (*People Smuggling*) yaitu pertama, Faktor penyebab (Perang, konflik, sosial, kemiskinan dan kurangnya kesempatan untuk menjadi imigran legal), kedua Faktor pendorong (Lingkungan yang terjamin dengan peluang ekonomi yang lebih baik dan hubungan keluarga serta budaya), dan yang ketiga, Faktor-faktor kombinasi (pelanggaran batas internasional, akses sindikat peneyelundupan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

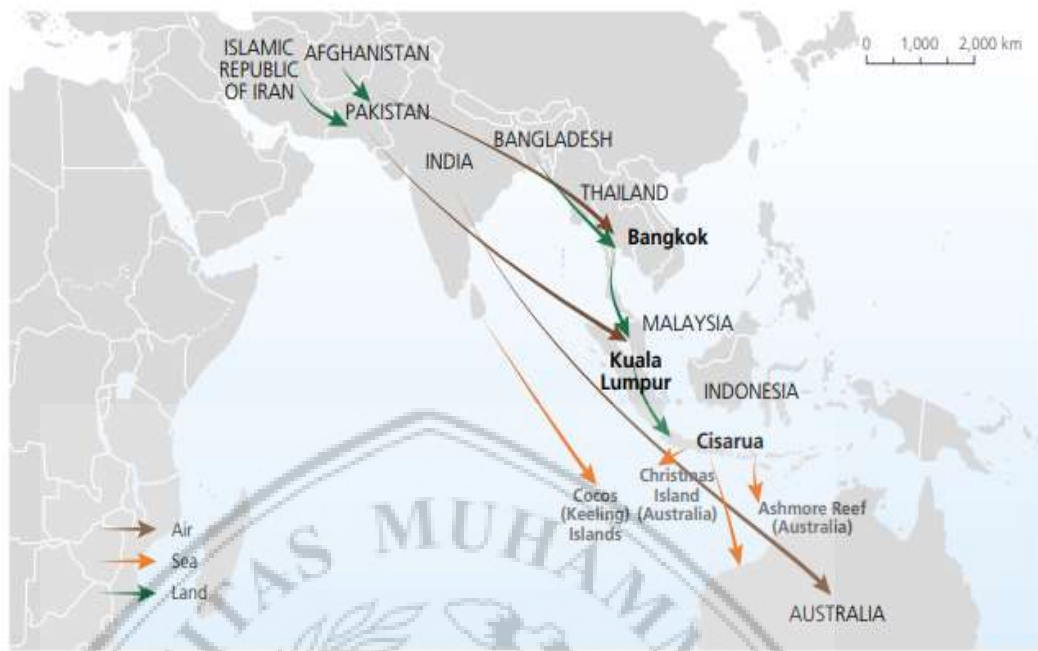
manusia, kemudahan komunikasi dan perjalanan serta kerentanan terhadap eksploitasi oleh sindikat kriminal terorganisasi).

Peningkatan penyelundupan manusia juga sering disebabkan oleh motivasi para imigran setelah mendengar janji-janji yang diberikan oleh penyelundup tentang apa yang mereka dapatkan di negara tujuan. Faktor eksternal ini menarik imigran untuk meninggalkan negara asalnya dan berpindah ke negara tujuan. Misalnya mereka dijanjikan ekonomi yang lebih stabil sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Para imigran dikendalikan oleh jaringan kriminal karena kebijakan imigrasi yang lebih ketat di negara-negara tujuan dan peningkatan teknologi untuk memantau penyeberangan perbatasan, para migran ilegal semakin rela bergantung pada bantuan penyelundup orang terorganisir.⁴⁹

**Gambar 2.5 Rute Penyelundupan Manusia ke Australia melalui
Indonesia.⁵⁰**

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), diakses melalui https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf Pada Tanggal 20/10/2018 Pukul 2:08 PM



Gambar diatas menyajikan rute penyelundupan manusia ke Australia melalui jalur maritim Indonesia. Ada tiga jalur yang dilalui dalam proses penyelundupan manusia yaitu melalui udara, laut dan darat. Keberangkatan dilakukan para migran dari Asia Selatan dan Barat Daya dengan menggunakan kapal ke Australia dari pulau utama Jawa. Kemudian, dilanjutkan ke kota Cisarua dimana kota ini dilaporkan sebagai titik transit penyelundupan manusia. Dari Cisarua, para migran akan melakukan perjalanan darat ke pantai selatan Jawa, di mana mereka akan naik perahu ke Pulau Christmas Australia.

Perbatasan Indonesia dan Australia yang strategis, memungkinkan jalur laut kedua negara menjadi tempat transit dalam rute perjalanan penyelundupan manusia. Faktor geografis kedua negara sangat menarik untuk kegiatan penyelundupan manusia. Posisi yang strateginya kedua negara sangat cocok untuk tempat transit sebelum imigran mencapai negara tujuannya. Bagi Australia,

kejahatan penyelundupan manusia (*People Smuggling*) telah menjadi bagian dari keamanan nasional Australia sejak pertengahan tahun 1990-an hingga saat ini. Kejahatan penyelundupan manusia dilakukan melalui laut dan telah menjadi kejahatan terorganisir yang marak terjadi terutama di Indonesia dan Australia. Pada abad ke-21, penyelundupan manusia ke Australia dilakukan melalui negara-negara transit di Asia Tenggara sehingga hal tersebut membutuhkan respon dari pemerintah Australia untuk mengatasi kejahatan penyelundupan manusia (*People Smuggling*).⁵¹

Penyelundup manusia adalah individu atau kelompok yang membantu orang lain secara ilegal memasuki suatu negara. Dalam kasus Australia, penyelundup manusia menyediakan akses udara atau laut. Penyelundupan manusia adalah ancaman besar bagi semua warga Australia karena, pertama ada kekhawatiran keamanan dan kriminal yang serius ketika orang yang tiba di Australia tidak diidentifikasi dengan benar. Kedua ada risiko karantina dan kesehatan utama pada orang yang melewati saluran imigrasi yang normal. Ketiga memproses imigran gelap menciptakan masalah logistik dan biaya yang signifikan dan yang keempat penyelundupan manusia melanggar kedaulatan Australia, memberikan sedikit kendali atas perbatasan.

Ada tiga fase penyelundupan manusia ke Australia yaitu tahap pertama, penyelundupan manusia terorganisir dari Indonesia pada pertengahan 1990-an hingga 1998, Fase kedua dimulai pada 1999 hingga 2001 yang ditandai dengan

⁵¹ Peter Munro, 2011, *People Smuggling And The Resilience Of Criminal Networks In Indonesia*, Journal Of Policing, Intelligence And Counter Terrorism, Vol 6, No 1, hlm 41

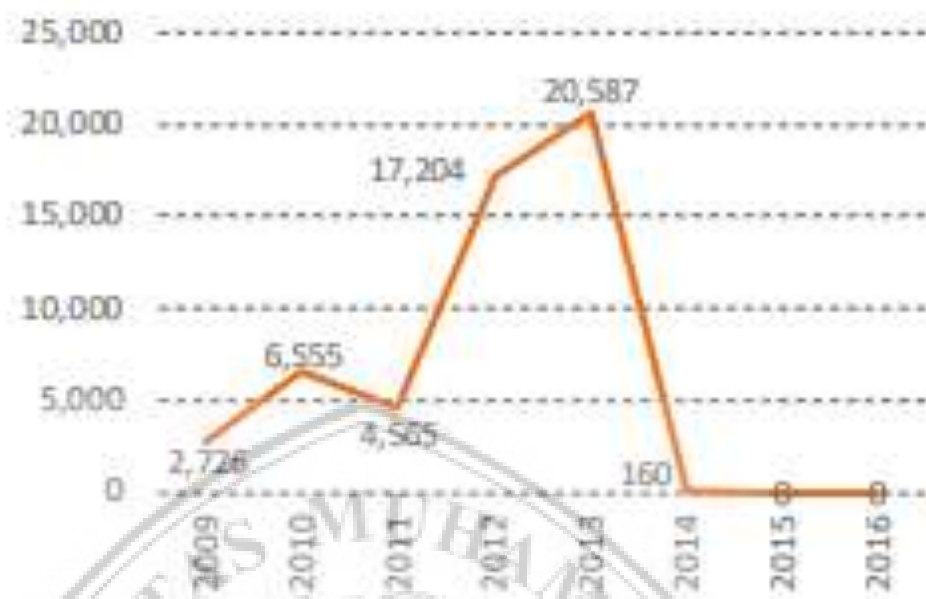
meningkatnya secara signifikan dalam kegiatan operasi penyelundupan manusia. Pada periode 1999 hingga 2000, terdapat 4175 orang yang masuk ke Australia. Fase ini, memuncak pada tahun 2001 dan memuncak di *Tampa* dan akhirnya masuk ke *Pacific Solution*. Kejadian- kejadian inilah yang menjadi penutup dari kegiatan operasi penyelundupan manusia hingga tahun 2008. Fase terakhir meliputi periode tahun 2008 hingga saat ini. Ini membuktikan dengan adanya penyelundup sekitar 6000 orang yang masuk ke Australia melalui rute maritim Australia pada tahun 2010.⁵²

Dalam konteks Australia, topik penyelundupan migran, pada umumnya, identik dengan apa yang disebut perahu tanpa izin, atau kedatangan maritim yang tidak teratur. Perhatian para pembuat kebijakan, media, dan masyarakat umum sama secara eksklusif pada kedatangan perahu yang umumnya membawa pencari suaka yang kebanyakan dari Timur Tengah atau Sri Lanka ke Australia, terutama ke Pulau Christmas, Ashmore Reef, dan dalam jumlah yang lebih sedikit ke pantai Northern Territory dan Australia Barat.

Gambar 2.6 Penyalundupan manusia melalui laut menggunakan perahu yang memasuki wilayah Australia tahun 2009-2016.⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ *Op. Cit* hlm 123



Gambar diatas munjukan data penyelundupan manusia ke Australia melalui laut pada tahun 2009-2016. Jumlah kedatangan imigran meningkat dengan cepat dari tahun 2009, mencapai lebih dari 20.000 pada tahun 2012-13. Akan tetapi penyelundupan manusia melalui laut ke Australia mulai mengalami penurunan pada akhir 2013-2016.

Jaringan penyelundupan manusia juga kembali beroperasi di Indonesia. Jalur perbatasan maritim Indonesia menjadi salah satu tempat aksi kejahatan penyelundupan manusia. Sejak September 2008, kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kejahatan penyelundupan dari Indonesia ke Australia sekitar 6000 orang pada tahun 2010. Mereka adalah penyelundup yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Beberapa dari mereka melakukan kegiatan kriminal lainnya sebelum menunggu kesempatan mereka untuk melanjutkan usaha penyelundupan mereka. Ada tiga

jenis jaringan penyelundupan manusia yang umumnya ada di Indonesia yaitu, pertama warga negara Indonesia yang melakukan kerja sama dengan warga negara lain dalam proses melakukan kejahatan penyelundupan manusia. Kedua, warga dari negara lain telah memutuskan untuk menetap di Indonesia secara khusus untuk memfasilitasi operasi kejahatan penyelundupan manusia. Ketiga, warga negara Indonesia selalu mewakili kelompok penting dalam kelompok masyarakat untuk menjalankan aksi kejahatan penyelundupan manusia. Adapun kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia pada tahun 2012 yang berasal dari beberapa negara yaitu Irak, Sri Lanka, Afganistan, Iran, dan Pakistan.

Indonesia dan Australia mempunyai misi atau tujuan yang sama dalam sektor maritim yaitu salah satunya adalah mengatasi kejahatan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*), yang terjadi diperbatasan antara Indonesia dan Australia. Dewasa ini, kedua negara meningkatkan kerja sama terutama dalam bidang maritime dimana kebijakan ini dilakukan guna mendukung kebijakan Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Pada 16 Maret 2018 di Sydney Australia, Indonesia dan Australia sepakat untuk bekerjasama dalam bidang maritim yang bertajuk Rencana Aksi Kejasama Maritim (*Maritime Cooperation*). Keamanan maritim menjadi fokus utama dalam perjanjian kerja sama tersebut. Komitmen-komitmen kerja sama antar kedua negara telah di tulis dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) yang berjudul *Joint Declaration on Maritime Cooperation*. MoU perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh delegasi masing-masing negara.

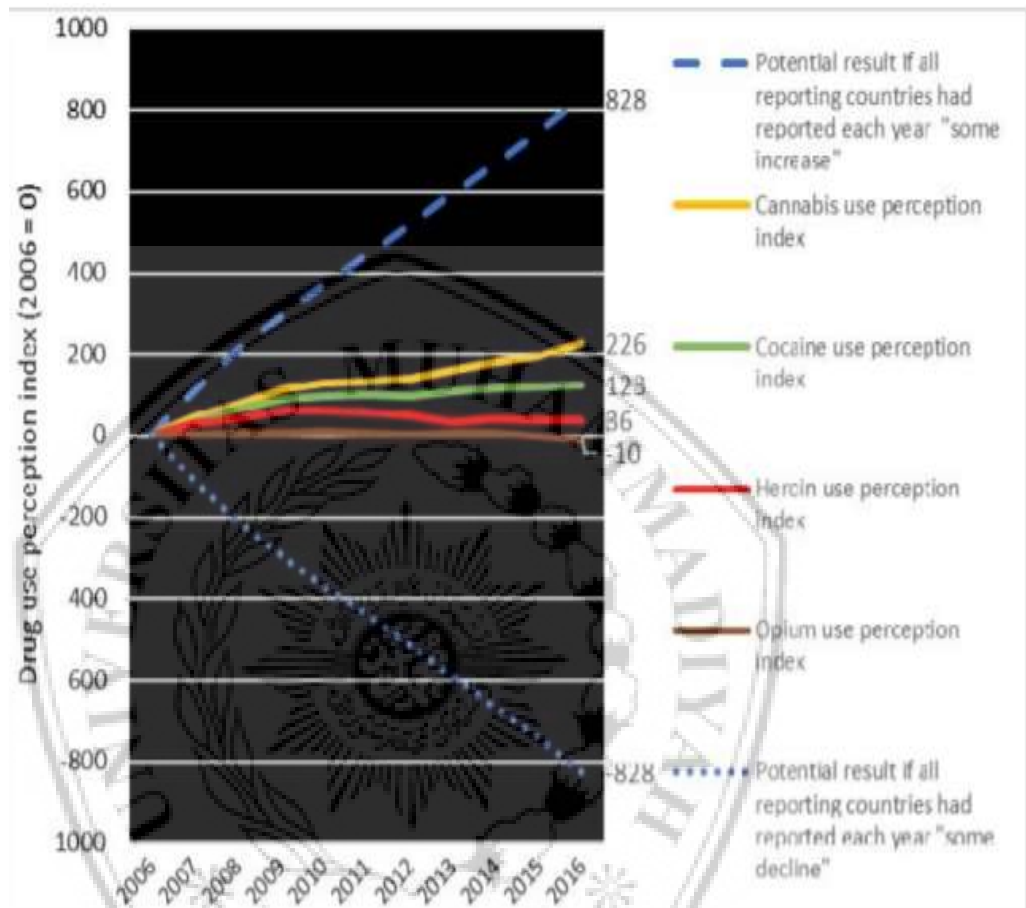
2.2.2 Drugs Trafficking

Kejahatan Perdagangan Narkoba (*Drugs Trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*). Indonesia menjadi salah satu negara darurat narkoba. Masuknya perdagangan narkoba dilakukan melalui jalur darat, laut maupun udara. Perdagangan Narkoba (*Drugs Trafficking*) adalah perdagangan gelap global yang melibatkan penanaman, pembuatan, distribusi dan penjualan zat yang melanggar undang-undang penjualan obat. Kantor PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) terus memantau dan meneliti pasar perdagangan obat gelap guna mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif tentang mereka dan bagaimana cara kerjanya.

Perdagangan Narkoba (*Drugs Trafficking*) juga merupakan salah satu masalah yang sulit ditangani di dunia saat ini. Masalah kedaulatan negara berdampak langsung terhadap apa yang dilakukan oleh komunitas internasional dalam mengatasi perdagangan narkoba yang terus berkembang. Ladang narkoba sebagian besar berada di beberapa negara yang kemudian narkoba tersebut diproses dan didistribusikan ke seluruh dunia. Peredaran Narkoba yang terjadi di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja akan tetapi berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Myanmar, Thailand dan Laos. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu, Heroin, Ganja, Kokain, dan Opium.⁵⁴

⁵⁴ Canisius College, *Contemporary Security Council, Economic & Social Council (Ecosoc) Drug Trafficking*, diakses melalui http://www3.canisius.edu/~diciccoj/mun_2015_csc_ecosoc_drug_trafficking.pdf Pada Tanggal 14/09/2018 Pukul 1:44 PM

Gambar 2.7 Indeks penggunaan obat untuk Ganja, Kokain, Heroin dan Opium, 2006-2016.⁵⁵



Gambar diatas menunjukkan indeks jenis-jenis narkoba yang digunakan dalam kurun waktu tahun 2006-2016. Indeks ganja mencapai 226 poin pada tahun 2016, indeks penggunaan kokain 123 poin, indeks penggunaan heroin 36 poin sedangkan penggunaan opium mrngalami penurunan hingga 10 poin hingga 2016. Angka-angka indeks ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja, kokain dan heroin meningkat sementara penggunaan opium sedikit menurut selama periode 2006-

⁵⁵ Vienna, Unodc (United Nations Office On Drugs And Crime), *World Drug Report 2018 Methodology Report*, diakses melalui <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wdr-2018-methodology-web.pdf> Pada Tanggal 15/09/2018 Pukul 8:39 PM

2016. Rata-rata hampir 83 negara yang melaporkan tren penggunaan narkoba per tahun ke UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) selama periode 2007-2016.⁵⁶

Penggunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Narkoba sudah tidak menjadi fenomena yang baru dikalangan masyarakat Indonesia. Penggunaan obat terlarang (Narkoba) sudah digunakan sejak tahun 2010 sebesar 0,63 persen dan 0,59 persen pada tahun 2015. Dalam konteks ini, laporan jumlah penggunaan narkoba dan ketergantungan obat yang diterima berjumlah 8.168 pada 2014. Selain heroin, ketersediaan dan penggunaan obat-obatan sintetis telah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Indonesia dalam Kuesioner Laporan Tahunan untuk tahun 2015, terdapat sekitar 1,1 juta orang yang telah menggunakan narkoba pada tahun 2015.⁵⁷

Kejahatan perdagangan narkoba menjadi keprihatinan bagi masyarakat internasional. Operasi perdagangan narkoba dilakukan dari berbagai kelompok-kelompok berbeda yang melakukan aksinya dari satu negara ke negara lainnya serta memiliki dampak yang buruk terhadap penggunaannya. Jaringan kriminal ini dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial baru dan pasar perdagangan narkoba secara luas. Organisasi perdagangan narkoba berubah tergantung pada sejumlah faktor, yaitu tergantung permintaan pasar, tingkat penanaman, akses ke

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Unodc (United Nations Office On Drugs And Crime), *Making Indonesia Safer From Crime, Drugs And Terrorism*, diakses melalui http://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2017/unodc_country_programme_2017_-_2020.pdf Pada Tanggal 15/09/2018 Pukul 8:49 PM

jalur perdagangan tanah yang ditetapkan, dan aktivitas penegakan hukum. Namun, seiring perkembangan zaman perdagangan narkoba telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir yang mungkin juga berkontribusi pada sejumlah pasar internasional dan lainnya.⁵⁸

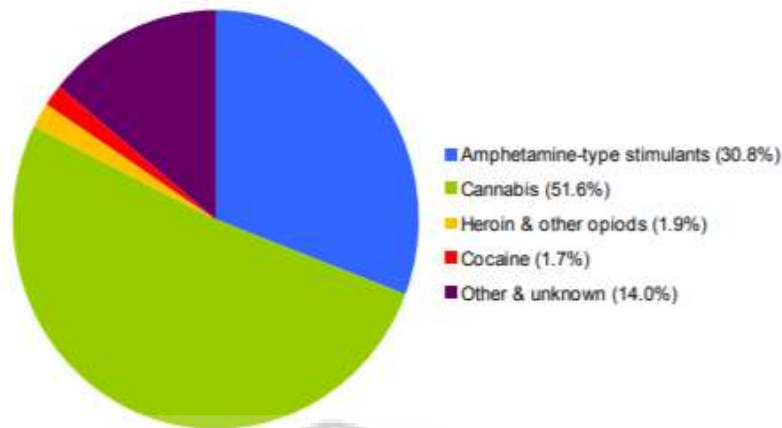
Permasalahan kejahatan yang sama juga terjadi di Australia. Sebagai negara yang memiliki garis pantai yang panjang, menjadikan jalur laut Australia menjadi rute kejahatan perdagangan narkoba (*Drugs Trafficking*) sehingga perdagangan narkoba adalah salah satu masalah serius bagi pemerintah Australia. Pemerintah Australia terus berupaya dalam mengatasi kejahatan perdagangan narkoba. Hasil survei yang dilakukan oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, mengatakan bahwa di Australia pada tahun 2016 telah ditemukan sekitar 3,1 juta warga Australia yang menggunakan narkoba atau zat terlarang lainnya.⁵⁹

Gambar 2.8 Perdagangan Narkoba di Australia.⁶⁰

⁵⁸ Diana S. Dolliver, *A Geographic Analysis Of Drug Trafficking Patterns On The Tor Network*, diakses melalui <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/gere.12241> Pada Tanggal 16/09/2018 Pukul 1:04 PM

⁵⁹ Perbandingan Penggunaan Narkoba Di Australia dan Indonesia, diakses melalui <https://www.tempo.co/abc/1892/perbandingan-penggunaan-narkoba-di-australia-dan-indonesia> Pada Tanggal 16/09/2018 Pukul 9:33 PM

⁶⁰ Australian Criminal Intelligence Commission, 2017, *Illicit Drug Data Report 2015–2016*, diakses Melalui https://www.acic.gov.au/sites/g/files/net1491/f/2017/06/iddr_2015-16_introduction.pdf?v=1498020198 Pada Tanggal 16/09/2018 Pukul 10:33 AM



Gambar diatas menyajikan jenis-jenis narkoba yang paling banyak dijual di pasar Australia. Adapun jenis-jenis narkoba tersebut yaitu pertama, Ganja (*Cannabis*) sebesar 51,6%. Ganja merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan seseorang hilang kendali, amnesia, dan halusinasi. Kedua, narkoba jenis ekstasi (*Amphetamine*) sebesar 30,8%. Narkoba jenis ekstasi merupakan jenis narkoba yang memiliki efek samping terhadap tubuh seseorang sehingga cepat lelah dan lesu. Ketiga narkoba jenis Heroin sebesar 2.9%. Narkoba jenis heroin dapat menimbulkan kejang-kejang bagi penggunanya. Keempat, Narkoba jenis Kokain (*Cocaine*) sebesar 1,7%. Kokain memiliki efek samping dapat merusak otak, tubuh, jantung hingga kematian. Kelima, jenis obat-obat terlarang lainnya sebesar 14,0% yang dapat berdampak buruk bagi keseshatan tubuh manusia.

2.2.3 Human Tracffiking

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) telah menjadi perhatian global selama beberapa dekade terakhir. Awalnya perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk dipaksa menjadi pekerja seks, pada tingkat lebih rendah adalah pembantu rumah tangga. Dewasa ini, ada pengakuan bahwa perempuan dan anak laki-laki diperdagangkan ke berbagai bentuk kerja dan eksploitasi seksual.⁶¹

Definition of human trafficking is in the *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* :

*The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.*⁶²

Berdasarkan Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai sebuah rekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan dalam bentuk paksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Beberapa tahun terakhir jumlah perdagangan manusia semakin mengalami peningkatan terutama di Indonesia. Berikut ini data hasil perkiraan

⁶¹ Human Trafficking, diakses melalui http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77394/who_rhr_12.42_eng.pdf;jsessionid=20c034f28e768f7a9bf2a28aa8cfa255?sequence=1 Pada Tanggal 18/09/2018 Pukul 05:16 AM

⁶² *Ibid*

perdagangan manusia (Human Tracffiking) dari ILO (*International Labour Organization*) dalam kurun waktu 2011-2018.

Gambar 2.9 Perkiraan hasil dari Perdagangan Manusia 2011-2018
dari ILO (*International Labour Organization*).⁶³



Gambar diatas menyajikan keragaman perdagangan manusia dan kejahatan eksploitasi yang menghasilkan keuntungan haram, sulit untuk menemukan data yang akurat dari total hasil kejahatan perdagangan manusia. Dewasa ini, salah satu Organisasi Buruh Internasional atau ILO (*International Labour Organization*) memperkirakan bahwa total hasil kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2011-2018 yang termasuk eksploitasi seksual, berjumlah USD 150,2 miliar per tahun berdasarkan perkiraan tenaga kerja paksa 2012, yang diterbitkan pada tahun

⁶³ Fatp Report, *Financial Flows From Human Trafficking*, diakses melalui <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf> Pada Tanggal 19/09/2018 Pukul 05:55 AM

2014. Jumlah ini dapat diuraikan pertama, eksploitasi seksual paksa USD 99 miliar. Kedua eksploitasi tenaga kerja paksa USD 51,2 miliar, dimana USD 43,40 miliar dihasilkan oleh tenaga kerja non-domestik, dan USD 7,9 miliar melalui pekerjaan rumah tangga.⁶⁴

Kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dapat mempengaruhi setiap negara didunia, sebagai negara asal, transit maupun tujuan bahkan gabungan dari semuanya. Perdagangan manusia biasanya terjadi dari negara yang kurang berkembang ke negara yang lebih maju, dimana orang menjadi rentan terhadap perdagangan berdasarkan kemiskinan, konflik, atau kondisi lainnya. Sebagian besar perdagangan manusia dilakukan dalam lingkup regional maupun nasional bahkan internasional hingga perdagangan manusia yang dilakukan secara jarak jauh. Salah satunya Eropa yang merupakan tempat tujuan bagi korban dari berbagai tempat tujuan, sementara korban dari Asia diperdagangkan diberbagai tujuan.⁶⁵ Berikut ini adalah tabel negara transit kejahatan perdagangan manusia yang dilaporkan oleh UNODC (Table 2.2).

Table 2.2 Incidence of reporting of transit countries reported by UNODC.⁶⁶

Very High	High	Medium	Low
-----------	------	--------	-----

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*), diakses melalui https://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/faqs.html#which_countries_are_affected_by_human_trafficking Pada Tanggal 19/09/2018 Pukul 1:24 PM

⁶⁶ An Evidence Assessment Of The Routes Of Human Trafficking Into The Uk, diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/115923/occ103.pdf Pada Tanggal 20/09/2018 Pukul 11:06 AM

Albania	Belgium	Belarus	Algeria
	Bosnia and		
Bulgaria	Herzegovina	Benin	Austria
Hungary	Czech Republic	Burkina Faso	Azerbaijan
Italy	France	Canada	Botswana
Poland	Germany	Côte d'Ivoire	Brunei Darussalam
Thailand	Greece	Croatia	Cameroon
	Kosovo (Serbia		
	and Montenegro)	Cyprus	Costa Rica
	Myanmar	Egypt	Ghana
	Romania	Gabon	Indonesia
	Serbia and	Georgia	Laos
	Montenegro	Hongkong	
		(China Special	
		Administrative	
	Slovakia	Region)	Latvia
	Macedonia	India	Lithuania
	Turkey	Kazakhstan	Morocco
	Ukraine	Malaysia	New Zealand
		Mexico	Nigeria
		Netherlands	Republic of
			Moldova

Russian Federation	Slovenia
Singapore	Spain
South Africa	Switzerland
Togo	
UK	

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dapat melibatkan banyak negara untuk jalur transit. Daftar negara transit di seluruh dunia, yang diatur oleh frekuensi transit perdagangan yang dilaporkan, disajikan pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Inggris dianggap sebagai negara transit “sedang”, dan negara-negara yang menjadi tempat transit paling banyak adalah, Belgia dan Perancis yang merupakan negara-negara transit “tinggi”. Sedangkan Albania, Bulgaria, Hungaria, Italia, dan Polandia dicatat sebagai "negara transit yang sangat tinggi" di Eropa. Negara-negara bagian Asia Tenggara juga menjadi tempat transit kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang salah satunya adalah Indonesia.⁶⁷

Perdagangan manusia juga merupakan industri kriminal yang dikendalikan oleh pasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip penawaran dan permintaan, seperti narkoba atau perdagangan senjata. Banyak faktor yang membuat anak-anak dan orang dewasa rentan terhadap perdagangan manusia. Namun, perdagangan manusia tidak hanya ada karena banyak orang rentan terhadap

⁶⁷ *Ibid*

eksploitasi tetapi sebaliknya, perdagangan manusia didorong oleh permintaan akan tenaga kerja, layanan, dan seks komersial murah. Perdagangan manusia adalah mereka yang menggunakan kekuatan, penipuan, atau paksaan untuk mengorbankan orang lain dalam keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan yang ada (Keuntungan Finansial).⁶⁸

Perdagangan manusia di Indonesia, terjadi pada perempuan, laki-laki, dan anak-anak dieksploitasi dalam kerja paksa penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan konstruksi diperkebunan, termasuk minyak sawit dan dipertambangan serta manufaktur. Banyak wanita dan gadis dieksploitasi dalam perbudakan domestik dan perdagangan seks yang dilakukan di lingkup regional maupun internasional. Korban sering direkrut dengan tawaran pekerjaan di restoran, pabrik, atau layanan domestik, tetapi tetap menjadi sasaran perdagangan seks. Faktor pinjaman hutang juga menjadi salah satu faktor yang sangat lazim di antara para korban dalam perdagangan seks.⁶⁹ Berikut ini adalah tabel data perdagangan manusia yang ada di Indonesia (Table 2.3).

Table 2.3 Data Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.⁷⁰

⁶⁸ National Human Trafficking Hotline, diakses melalui <https://humantraffickinghotline.org/type-trafficking/human-trafficking> Pada Tanggal 19/09/2018 Pukul 2:02 PM

⁶⁹ US Department Of State, 2018, *Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons*, diakses melalui <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2018/282673.htm> Pada Tanggal 19/09/2018 Pukul 9:11 PM

⁷⁰ Ade Latifa & Mita Noveria, *Gender Perspective Of Human Trafficking In Indonesian Border Areas*, diakses melalui <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=c90c86cf191e8f86577a001f78d83e6d?doi=10.1.1.550.8853&rep=rep1&type=pdf> Pada Tanggal 19/09/2018 Pukul 2:31 PM

Information	Sex		Age (years)	Destination Area
	Male	Female		
Trafficked as sexual workers	-	Teenagers	14-15	Malaysia and Singapore
Women trafficking with transnational marriage modus	-	40 Women	>18	Taiwan and Hongkong
Children as sexual objects	-	-	<17	Overseas
Trafficked as sexual workers	-	Female workers applicants	15-23	Kinibalu, Sabah, Malaysia
Labor exploitation	-	2 person	18-23	Malaysia, Beirut, Lebanon
Trafficked as sexual workers	-	-	13-18	Malaysia, Hongkong, Singapore
Trafficked as sexual workers	-	Junior and Senior High School Students	-	Malaysia and Singapore
Infant trafficking	3 babies	-	7-14	Singapore and Thailand

Victims forced to prostitute for 15hours/day without pay & under pressure	-	3 person	16-20	Tawau, Malaysia
Sale of Girls for prostitute practices	-	1 person	-	Middle East
Infant trafficking	-	-	<1	Malaysia
Indonesian laborers were arrested due to some acts that were forced by their employee, such as drug dealers, sold illegal weapons, prostitutes	-	-	-	Malaysia
Trafficked as sexual workers by art representative modus	-	2 person	15-20	Tokyo and Kyoto
Female workers were forced as sexual workers	-	17 person	>17	Kinibalu
20 Infants were trafficked	-	-	2-14 months	Overseas
Children was trafficked as sexual workers	-	-	18	Amsterdam
Trafficked as sexual workers	-	1 person	-	Middle East

Kidnapping mother and sold their babies.	-	3 person	21-28	Taiwan
Mothers and her babies were trafficked	-	5 person	20-25	No available information
Trafficked as sexual workers	-	14 person	>17	Malaysia

Perdagangan manusia menjadi fenomena yang sama di Australia. Laporan tentang jumlah orang yang diperdagangkan di Australia juga sangat bervariasi tergantung pada sumber informasi. Sumber-sumber pemerintah menunjukkan bahwa satu atau dua ratus orang telah diperdagangkan ke Australia dalam beberapa tahun terakhir, sementara kelompok-kelompok advokasi berpendapat bahwa perdagangan ini melibatkan beberapa ribu orang. Jika tidak adanya statistik yang lengkap dan akurat, sulit untuk mengukur sejauh mana perdagangan manusia di Australia. Data statistik yang lengkap tentang kasus yang biasanya dilaporkan ke polisi, tentang jumlah perdagangan dan perdagangan yang terkait dengan investigasi, penuntutan para pedagang, dan kekhawatiran para korban perdagangan manusia.⁷¹

Rencana Aksi Nasional Australia untuk Memerangi Perdagangan Manusia dan Perbudakan 2015–2019 menyediakan kerangka kerja strategis untuk

⁷¹ Andreas Schloenhardt, Genevieve Beirne And Toby Corsbie, *Human Trafficking And Sexual Servitude In Australia*, diakses melalui <https://www.austlii.edu.au/au/journals/unswlj/2009/2.pdf> Pada Tanggal 19/09/2018 Pukul 9:44 PM

merespon perdagangan manusia dan perbudakan yang terjadi di Australia. Rencana tersebut dikembangkan bersama mitra pemerintah dan non-pemerintah, dan diluncurkan oleh Menteri Kehakiman, Hon Michael Keenan MP, pada 2 Desember 2014. Australia pada dasarnya adalah negara tujuan untuk perdagangan manusia dan perbudakan, dengan mayoritas orang yang diperdagangkan adalah wanita dari Asia yang telah dieksploitasi di dalam industri kerja seks. Kasus laki-laki dan perempuan dieksploitasi dalam situasi di luar industri kerja seks, seperti dalam pekerjaan rumah tangga, industri perhotelan dan konstruksi.⁷²

2.2.4 Illegal Fishing

IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penangkapan ikan yang tidak sah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam pelanggaran regional, nasional atau aturan dan peraturan internasional. Penangkapan ikan ilegal dengan melanggar peraturan perikanan seperti menangkap ikan dengan alat-alat terlarang yang dapat merusak ekosistem laut. Hal ini juga dapat memperngaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama dinegara kepulauan seperti Indonesia dimana masyarakatnya sebagian besar sangat bergantung pada sumber daya ikan.⁷³

⁷² National Action Plan, diakses melalui <https://www.homeaffairs.gov.au/crime/documents/trafficking-national-action-plan-combat-human-trafficking-slavery-2015-19.pdf> Pada Tanggal 20/09/2018 Pukul 10:44 AM

⁷³ Seafish The Authority And Seafood, 2012, *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU)*, diakses melalui http://www.seafish.org/media/742176/seafishguidetoiuu_201211.pdf Pada Tanggal 20/09/2018 Pukul 1:39 PM

Dalam skala global, IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) adalah masalah besar dan sangat sulit untuk dihitung. Kejahatan Illegal Fishing dapat terjadi di hampir semua perikanan, dari perairan dangkal maupun perairan yang memiliki kedalaman yang cukup dalam. Illegal fishing menjadi masalah yang serius, terutama di negara-negara berkembang yang kurang menegakkan peraturan seperti kontrol pendaratan, inspeksi kapal dan kapal patroli. IUU dapat berkembang di daerah-daerah di mana pemantauan, kontrol dan pengawasan (oleh kapal patroli, pesawat udara, dan satelit) tidak memadai. Kejahatan Illegal Fishing menimbulkan kerugian global yang diperkirakan antara US \$ 10 miliar dan US \$ 23,5 miliar setiap tahunnya.⁷⁴

Laporan 2017 oleh Stimson Center menganalisis efek dari IUU fishing dari perspektif keamanan nasional. Menurut Asosiasi Pangan dan Pertanian AS, 90 persen perikanan sepenuhnya dieksploitasi secara berlebihan dan habis. 20-50 persen tangkapan ikan global ditangkap secara ilegal, salah label, tidak pernah dilaporkan, atau dari perikanan tanpa rezim pengelolaan. Keuntungan dari penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan diperkirakan antara \$ 15,5 dan \$ 36,4 miliar dalam setahun, lebih dari total produk domestik bruto dari beberapa negara di mana hal ini merupakan masalah global.

Penangkapan ikan ilegal mengancam rantai pasokan makanan bagi masyarakat pesisir yang miskin. Lautan mendukung mata pencaharian sekitar 520 juta orang yang bergantung pada kegiatan memancing dan 2,6 miliar orang yang bergantung pada ikan sebagai bagian penting dari sumber pemenuhan makanan

⁷⁴ *Ibid*

mereka. Banyak negara berkembang, sekitar 50 persen protein hewani mereka berasal dari makanan laut. IUU fishing menimbulkan 6 ancaman utama terhadap keamanan dan stabilitas di seluruh dunia, yaitu ancaman terhadap keamanan ekologi, keamanan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas geopolitik, serta ancaman pembajakan maritim dan kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Crime*). Kadang-kadang, kapal penangkap ikan ilegal menahan orang yang terjebak sebagai budak di atas kapal. Amerika Serikat merupakan negara yang mengimpor lebih dari 90 persen makanan lautnya, produk tersebut yang akan dikelola oleh orang dijebak dikapal sebagai budak kapal.⁷⁵

Kejahatan IUU adalah masalah internasional karena kegiatan tersebut berbahaya bagi stok ikan global. Adanya Illegal Fishing dapat merusak sistem manajemen yang efektif. Kegiatan memancing IUU juga menimbulkan efek yang berbahaya pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Secara historis, Indonesia telah mengalami tingkat IUU fishing yang tinggi dari armada asing. Pada akhir 2014, berusaha untuk membatasi kegiatan tersebut, negara menerapkan kebijakan yang keras dan kontroversial yang mengakibatkan tenggelamnya 318 kapal nelayan ilegal (296 berbendera asing) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa tingkat pelaku penangkapan ikan secara ilegal semakin mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat berdasarkan temuan yang dilakukan oleh KKP pada september 2017 hingga

⁷⁵ About IUU Fishing, diakses melalui <https://seashepherd.org/campaigns/iuu-fishing/about-iuu-fishing/> Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 1:22 PM

Agustus 2018 terdapat sekitar 1.636 kapal yang melanggar izin wilayah pengelolaan perikanan (WPP).⁷⁶

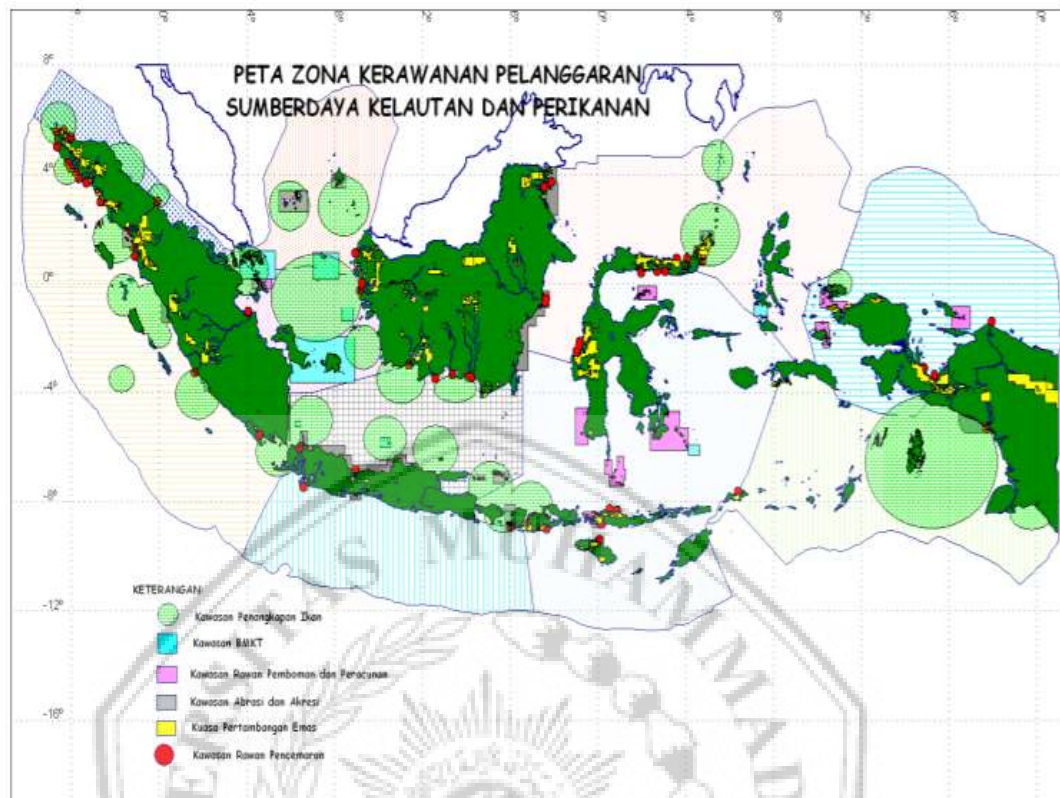
Nilai strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan ikan dan sumber daya alam telah mempengaruhi wilayah tersebut untuk memiliki potensi konflik. Berbagai jenis pelanggaran sering dilakukan dan terus berkembang seolah-olah tidak ada rasa takut atau kecanggungan untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut. Hal ini mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap tindakan apa pun yang dianggap melanggar dan merugikan Indonesia terutama dalam bidang maritim. Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang memiliki potensi terbesar dalam mengoptimalkan perekonomian negara.⁷⁷ Berikut ini peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2.10 Peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.⁷⁸

⁷⁶ Julie Cohen, 2018, *Researchers Explore An Alternative Pathway To Fast-Tracking The Global Recovery Of Fisheries*, diakses melalui <http://globalfishingwatch.org/research/fighting-illegal-fishing/> Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 12:43 PM

⁷⁷ Rahadi Wasi Bintoro, 2018, *Corporate Criminal Liability Towards The Doer Of Illegal, Unregulated And Unreported Fishing In Indonesia*, diakses melalui https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/22/e3sconf_scifimas2018_06003.pdf Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 1:09 PM

⁷⁸ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, diakses melalui <file:///c:/users/user/downloads/305-592-1-sm.pdf> Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 1:42 PM



Gambar diatas menyajikan penangkapan ikan secara illegal yang terjadi di Indonesia dimana sekitar 31 kegiatan penangkapan ikan secara illegal yang beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional. Kegiatan tersebut meliputi 32 perairan timur Indonesia yaitu: (1) Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru), (2) Laut Maluku, Laut Halmahera, (3) Perairan Tual (4) Laut Sulawesi (5) Samudra Pasifik (6) Perairan Indonesia-Australia (7) Perairan Kalimantan Timur. Perairan Barat Indonesia meliputi, (1) Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan, (2) Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (2) Selat Malaka (3) Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga) (4) Selat Karimata, Perairan Pulau Tambelan

(Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat) (5) Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan).

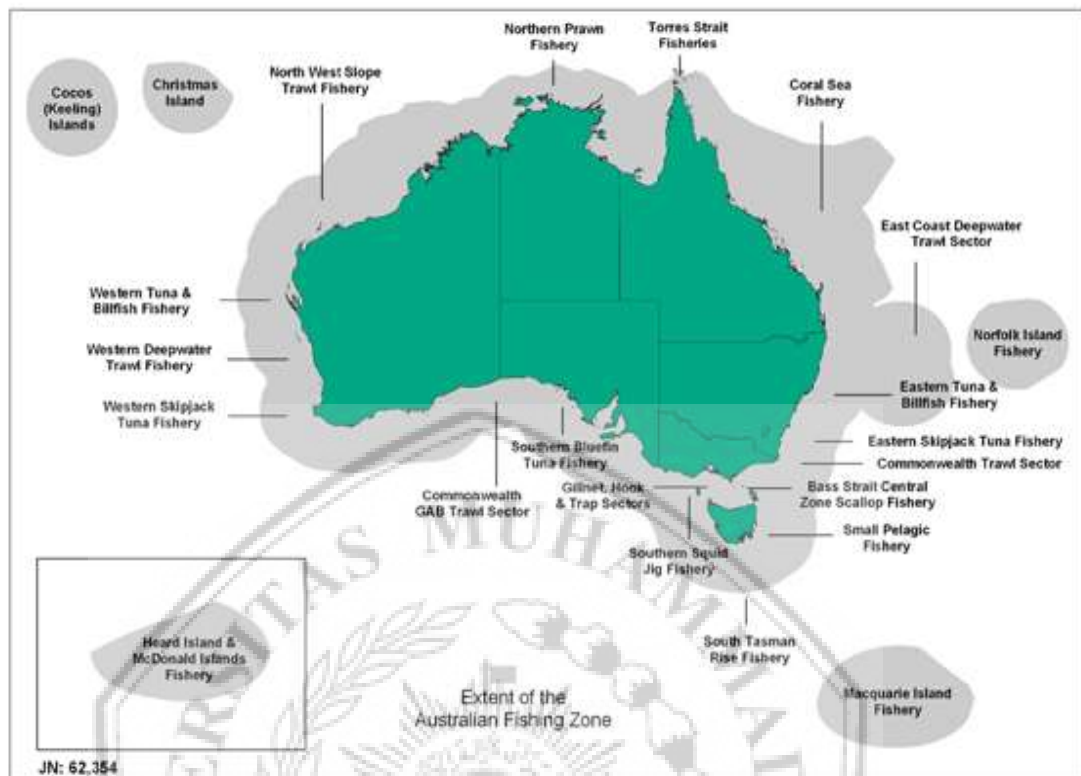
IUU telah ditemukan terjadi di semua samudra di dunia, termasuk di perairan Australia. Australian Fishing Zone (AFZ) adalah yang terbesar ke-3 di dunia dengan Zona Ekonomi Eksklusif Australia (ZEE) yang terdiri dari sekitar 10 juta km di daerah. ZEE mencakup 2 juta km laut yang berbatasan dengan Wilayah Antartika Australia di selatan. Perikanan di Australia bernilai US \$ 2,2 miliar (Departemen Pertanian 2014) dan mempekerjakan lebih dari 100.000 orang baik secara langsung maupun tidak langsung. IUU fishing di Australia kebanyakan terjadi di perairan Australia Utara termasuk perairan Australia Barat (WA), Northern Territory (NT) dan perairan utara Queensland (QLD) dan di Samudera Selatan di sekitar Pulau Heard dan McDonald. Illegal fishing dilakukan di perairan Australia utara karena perairan tersebut memiliki sumber daya laut yang melimpah. Mayoritas kegiatan IUU fishing di ZEE Australia telah dilakukan oleh nelayan asing.⁷⁹

Gambar 2.11 Zona penangkapan ikan yang menunjukan lokasi Illegal

Fishing di Australia Utara.⁸⁰

⁷⁹ Joanna Vince, 2018, *Progress And Challenges In Eliminating Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing In Australian Waters*, diakses melalui <https://wc2018.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events/wc2018/papers/paper-103650-2018-07-18t043329-0400.pdf> Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 2:55 PM

⁸⁰ The Australian Fishing Zone, diakses melalui <http://www.agriculture.gov.au/fisheries/domestic/zone> Pada Tanggal 21/10/2018 Pukul 8:29 PM



Gambar diatas menunjukan zona penangkapan ikan yang menunjukan lokasi kegiatan Illegal Fishing di Australia Utara. Perairan Australia utara memang menjadi perairan dengan angka kejahatan Illegal Fishing yang tinggi terutama di beberapa lokasi yaitu Pulau Heard dan McDonald, Chirstmas Island, Macquarie Island. Beberapa zona penangkapan ikan di Australia diatas, memiliki sumber daya laut yang melimpah sehingga sangat rentan akan ancaman kejahatan Illegal Fishing.

2.2.5 Terrorism

Terorisme umumnya dipahami sebagai sebuah tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil dalam mengejar tujuan-tujuan politik atau ideologis. Terorisme memiliki dampak langsung pada kenikmatan sejumlah hak asasi

manusia, khususnya hak atas kehidupan, kebebasan dan integritas fisik. Tindakan teroris dapat menggoyahkan pemerintah, melemahkan masyarakat sipil, membahayakan perdamaian dan keamanan suatu negara, mengancam pembangunan sosial dan ekonomi, dan berdampak negatif serta mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan terorisme.⁸¹

Terorisme maritim adalah masalah transnasional dimana dalam proses mengatasinya harus benar-benar dengan kerja sama yang efektif antara negara-negara. Jalur maritim juga menjadi salah satu rute operasi kejahatan transnasional yang salah satunya adalah terorisme. Negara-negara di dunia telah menyaksikan peningkatan, pengelompokan, dan kebangkitan kembali kelompok-kelompok teroris yang terus meningkat. Dewasa ini semakin diperburuk dengan keunggulan ideologi ISIS dimana kelompok ini menggeser aktor lama yang berpengaruh, menyoroti yang baru, dan mengubah semangat jihadis dengan ideologi baru dan kuat. ISIS (*Islam State of Iraq and Syria*) adalah kelompok islam radikal yang mengklaim telah memulihkan kekhalifahan dan saat ini melancarkan perang brutal di beberapa negara yang ada di dunia terutama Iraq, Afganistan, Syira, Nigeria, Pakistan, Somalia, termasuk Indonesia dan Australia. Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menjadi bentuk baru terorisme dalam tatanan dunia teroris yang melakukan tindakan jahat mereka terhadap negara-negara lain terutam negara

⁸¹ Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, diakses melalui <https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32en.pdf> Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 8:06 PM

dengan mayoritas penduduk muslim. Terorisme juga terjadi dalam bidang maritim seperti perompakan dan perdagangan senjata.⁸²

Gambar 2.12 Aksi Perompakan di Perairan Laut Indonesia pada bulan Januari-Juni 2017.⁸³



Gambar diatas menunjukan bahwa meningkatnya aksi perompakan di perairan laut Indonesia mengalami tingkat kejahatan perompakan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara seperti Filipina, Nigeria dan Venezuela. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami kejahatan perompakan.

Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk Muslim, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Jumlah ini kira-kira sama dengan 13 persen dari jumlah total umat Islam di dunia.

⁸² Justina Chika Alaneme, 2015, *Islamic State Of Iraq And Syria – A Threat To Global Peace And Security*, diakses melalui <http://iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/vol17-issue1/version-3/h017134549.pdf> Pada Tanggal 22/09/2018 Pukul 9:26 PM

⁸³ 87 Aksi Bajak Laut Januari-Juni 2017, Didominasi di Perairan Indonesia, diakses melalui <http://beritatrans.com/2017/07/15/87-aksi-bajak-laut-januari-juni-2017-didominasi-di-perairan-indonesia/> Pada Tanggal 21/10/2018 Pukul 9:03 PM

Namun, kelompok 200 juta orang ini tidak mewakili kelompok yang homogen. Banyak variasi dapat ditemukan dalam Islam Indonesia maupun dalam persepsi mereka tentang peran yang harus dimainkan Islam dalam politik dan masyarakat Indonesia. Meskipun sekitar 88 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, Indonesia bukanlah negara Islam yang berada dibawah naungan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang Indonesia dapat diberi label Muslim moderat, mayoritas menyetujui demokrasi sekuler dan masyarakat pluralis. Sikap ini terlihat dalam hasil pemilihan legislatif baru-baru ini ketika partai-partai politik Islam yang menekankan pentingnya aliran Islam yang mendominasi dan ketat dalam pemerintahan menerima sedikit suara. Partai-partai politik sekuler yang mendukung demokrasi dan masyarakat Islam yang moderat dan toleran, di sisi lain, terbukti sangat populer.⁸⁴

Gerakan Islam radikal di Indonesia bukanlah fenomena baru tetapi telah hadir sejak zaman kolonial. Alasan mendasar bagi seorang Muslim untuk meradikalisasi adalah karena adanya pengucilan politik, perasaan bahwa ketidakadilan besar telah dilakukan terhadap komunitas Muslim atau perasaan dominasi barat (yang mengakibatkan kebencian Barat). Juga penting untuk dicatat bahwa gerakan radikal Indonesia berasal dari gerakan reformasi di Timur Tengah. Berikut ini serangan terorisme di Indonesia yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.

⁸⁴ Indonesia Investments, 2018, Islam Radikal Di Indonesia, diakses melalui <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/islam-radikal/item245?> Pada Tanggal 23/09/2018 Pukul 05:53 Am

Gambar 2.13 Serangan Terorisme di Indonesia dari Tahun ke Tahun.⁸⁵



Gambar diatas menyajikan adanya serangan teroris di Indonesia antara yang terjadi hingga 2018 dimana serangan tersebut sebagian besar dari kegiatan teroris di Indonesia yang telah terjadi sejak tahun 1977. Pada tahun 2000, Indonesia mengalami serangan teroris dan mengakibatkan korban luka mencapai 535 orang dan korban meninggal dunia sekitar 246 orang hingga pada tahun 2018 serangan terorisme masih terjadi dengan korban luka 66 dan korban meninggal dunia 28 orang.

Hampir sepertiga serangan teroris di Indonesia dilakukan oleh kelompok terkoordinasi. Serang tersebut jauh lebih tinggi daripada jumlah serangan

⁸⁵ Terorisme Indonesia: Dari Separatisme hingga Teror atas Nama Agama, diakses melalui <https://tirto.id/terorisme-indonesia-dari-separatisme-hingga-teror-atas-nama-agama-ckUK> Pada Tanggal 21/10/2018 Pukul 9:38 PM

terkoordinasi secara global, yaitu 12,5%. Di Indonesia, jenis serangan yang paling umum adalah pengeboman (33%), jenis senjata yang paling umum adalah Bahan Peledak (37%), dan jenis target yang paling umum adalah Warga Negara & Properti Swasta (23%). Di antara insiden-insiden di Indonesia yang diketahui pelaku, yang paling aktif adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bertanggung jawab atas 113 serangan teroris di negara itu. GAM paling aktif pada tahun 2001, bertanggung jawab atas 58 insiden yang menewaskan 65 orang pada tahun itu. Akhirnya GAM menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005.⁸⁶

Pada September 2014, untuk pertama kalinya pemerintah Australia meningkatkan kerja sama dalam upaya memerangi ancaman terorisme. Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) terus meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi ancaman terorisme. Terorisme menjadi salah satu masalah serius bagi pemerintah Australia. Pemerintah Australia secara proaktif dalam bekerjasama dengan mitra internasional dalam menurunkan resiko serangan terorisme. Secara garis besar kelompok terorisme yang paling marak melakukan aksinya di Australia adalah AQ (Al-Qaeda) dan ISIS (*Islam State of Iraq and Syria*). Jaringan kelompok teroris kedua kelompok tersebut sangat mengancam keamanan nasional Australia. Kelompok tersebut memainkan peran penting dalam upaya

⁸⁶ *Ibid*

radikalisasi dan mempengaruhi orang lain secara global. AQ dan ISIS adalah kelompok teroris yang dalam melakukan aksinya menggunakan kekerasan.⁸⁷

Kelompok-kelompok ini menggunakan kekuatan internet untuk menyebarkan propaganda mereka ke khalayak yang ada dan juga mengarahkannya mereka terhadap radikalisasi. Propaganda teroris terus tumbuh dan berkembang di Australia. Australia terus diserang propaganda dari ISIS yang menambah berkembangnya terorisme. Dampak dari tindakan tersebut dapat dilihat secara signifikan dan jelas dalam serangan teroris yang terjadi di Australia sejak 2014. Ancaman teroris utama di Australia berasal dari sejumlah kecil ekstremis Islam, terutama aktor tunggal atau kelompok kecil. metodologi serangan yang digunakan sederhana tetapi memungkinkan individu untuk bertindak secara independen dengan tingkat kelincahan yang tinggi untuk membentuk terorisme yang lebih luas di Australia.⁸⁸ Sementara targer serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Australia adalah terhadap pemerintah atau otoritas seperti militer, polisi dan badan keamanan serta anggota masyarakat dan lokasi di mana banyak orang berkumpul juga dapat diserang tanpa pandang bulu. Serangan terhadap masyarakat umum yang dirancang untuk menyebabkan cedera atau kematian guna untuk mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan rasa takut.⁸⁹

⁸⁷ Australia's Counter-Terrorism Strategy, diakses melalui <https://www.nationalsecurity.gov.au/media-and-publications/publications/documents/australias-counter-terrorism-strategy-2015.pdf> Pada Tanggal 23/09/2018 Pukul 1:25 PM

⁸⁸ Australia National Security, diakses melalui <https://www.nationalsecurity.gov.au/securityandyourcommunity/pages/national-terrorism-threat-advisory-system.aspx> Pada Tanggal 23/09/2018 Pukul 1:42 PM

⁸⁹ *Ibid*

Serangan teroris juga marak terjadi di industri maritim Australia. Dalam perekonomian, Australia sangat bergantung pada pengiriman dan perdagangan yang dilakukan melalui jalaurlaut. Pemerintah Australia menyatakan bahwa ada beberapa ancaman teroris yang dilakukan terhadap industri maritim Australia. Pertama, serangan langsung terhadap fasilitas pelabuhan (terutama terminal kontainer, minyak, gas atau kimia). Kedua, serangan langsung ke kapal, khususnya kapal yang berisiko tinggi, seperti kapal yang sedang mengangkut barang berbahaya berbiaya tinggi, feri penumpang, kapal pesiar, atau kapal Angkatan Laut AS di pelabuhan Australia. Ketiga, serangan dilakukan terhadap kapal dengan cara membajak dengan tujuan sebagai senjata melawan sesuatu yang lain ataupun memperoleh kepentingan.⁹⁰

Dewasa ini, serangan terorisme memang menjadi salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di beberapa negara di dunia. Negara dengan mayoritas muslim menjadi target utama dalam melakukan aksi kejahatan terorisme. Serangan teroris melibatkan penggunaan atau kekerasan terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi, memaksa atau menuntut tebusan. Kejahatan terorisme biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir. Terorisme dilakukan dengan bermotifkan politik dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik atau mencapai tujuan politik. Aksi terorisme sering dilakukan dengan menggunakan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.

2.2.6 Illegal Imigrant

⁹⁰ Maritime Security Awareness Training, 2012, diakses melalui <http://maritimecareers.com.au/wp-content/uploads/2016/01/Maritime-Security-Awareness-cse-ed-v11.pdf> Pada Tanggal 17/10/2018 Pukul 11:28 AM

Perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia juga menjadi jalur keluar masuknya imigran gelap. Myron Weiner adalah seorang ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana migrasi internasional dapat menciptakan suatu ancaman bagi negara. Secara politis, Myron mengemukakan bahwa transnational migrasi dapat dikatakan sebagai ancaman pada suatu stabilitas dan keamanan negeri ketika para imigran adalah lawan kepada rejim di negeri tersebut. Jika dilihat dari fakta yang ada, negara yang menerima para imigran internasional mungkin akan menimbulkan tegangan atau konflik, tetapi juga berkemungkinan untuk menimbulkan suatu situasi kontradiksi.⁹¹

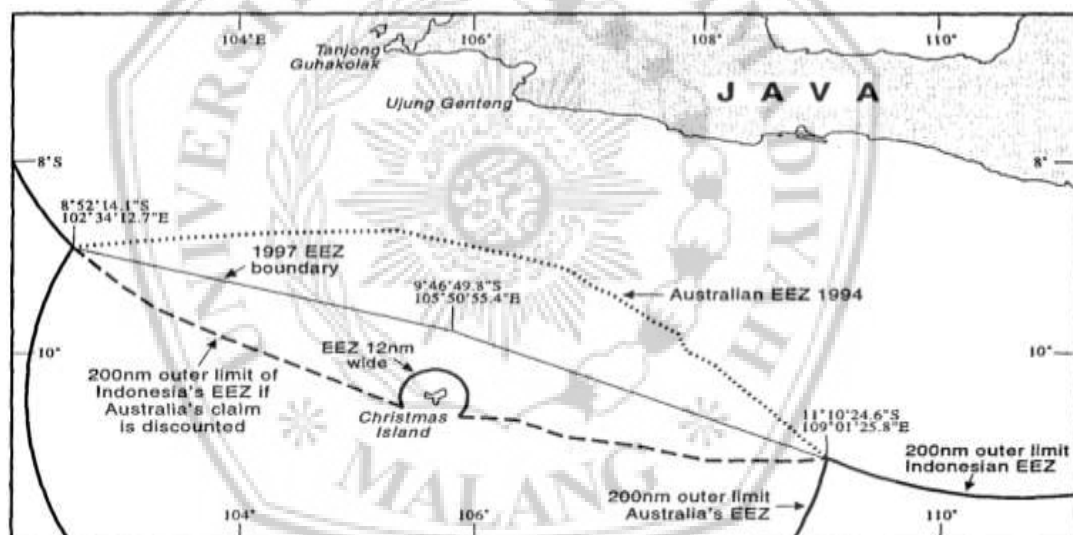
Migran memilih untuk pindah bukan karena ancaman langsung penganiayaan atau kematian, tetapi hal tersebut dilakukan terutama untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau dalam beberapa kasus untuk mendapatkan pendidikan baik, berkumpul kembali bersama keluarga, ataupun alasan lain yang mempengaruhi mereka untuk pindah ke negara lain. Berbeda dengan pengungsi yang tidak dapat kembali ke rumah dengan aman, sedangkan para migran tidak menghadapi hambatan seperti itu untuk kembali. Jika mereka memilih untuk pulang, mereka akan terus menerima perlindungan dari pemerintah mereka.⁹²

⁹¹ Liserida F. Manik, 2011, *Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Menangani Imigran Ilegal Myanmar di Indonesia (2008-2011)*, diakses melalui <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3564/jurnal%20q.pdf?sequence=1&isallowed=y> Pada Tanggal 23/09/2018 Pukul 2:31 PM

⁹² Adrian Edwards, 2015, *UNHCR Viewpoint: Refugee Or Migrant Which Is Right?*, diakses melalui <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html> Pada Tanggal 23/09/2018 Pukul 2:43 PM

Dewasa ini, Indonesia dan Australia menjadi salah satu negara transit untuk para imigran gelap. Salah satu pulau yang menjadi tempat transitnya imigran gelap yaitu Pulau Natal (*Christmas Island*) dan Pulau Jawa. Pulau Christmas memiliki luas 140 kilometer persegi dan populasi sekitar 2000. Pada 16 Juli 1994, ketika Australia menerbitkan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif, batas utara Pulau Christmas mengikuti garis yang berjarak sama antar pulau di wilayah Indonesia (Gambar 2.14).

Gambar 2.14 Perbatasan ZEE antara Pulau Natal dan Pulau Jawa.⁹³

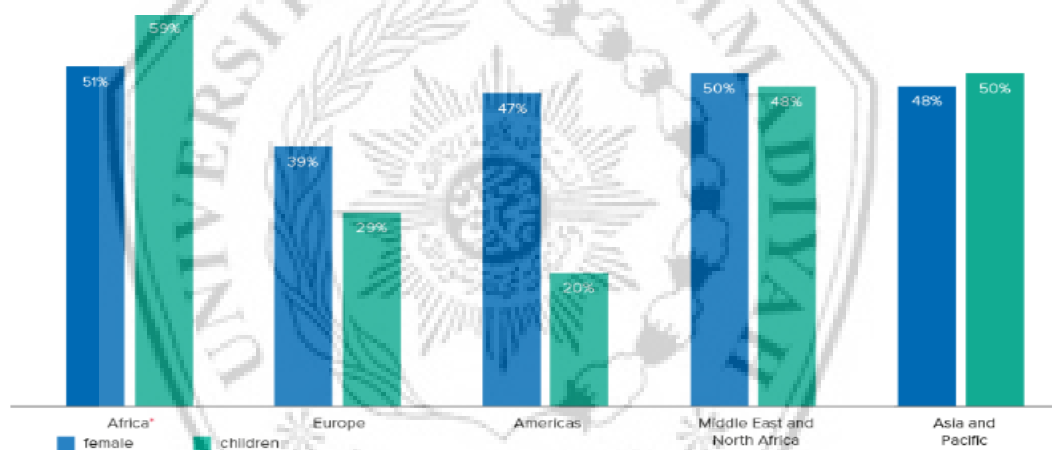


Pulau Christmas, yang terletak di Samudera Hindia kini menjadi tempat transit para imigran gelap. Terdapat sekitar 2.000 orang imigran, sebagian besar berasal dari Timur Tengah, Sri Lanka dan Afghanistan yang mencoba memasuki Australia. Ribuan pencari suaka mempertaruhkan nyawa mereka dengan berlayar di laut lepas tanpa peralatan yang layak demi mencapai Australia setiap tahun.

⁹³ Op. Cit hlm 134

Secara global, pada tahun 2017 sekitar 1,9 juta orang terdaftar sebagai pencari suaka melalui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Dari jumlah tersebut, 36.200 orang tercatat berusaha mencari suaka ke Australia. Hal ini memberikan dampak terhadap peningkatan populasi pengungsi dunia yang hingga saat ini mencapai 25,4 juta orang pada akhir tahun 2017, setelah meningkat lebih dari 10 persen sejak tahun sebelumnya.⁹⁴

Gambar 2.15 Data Populasi Pengungsi di Australia Menurut UNHCR
(United Nations High Commissioner for Refugees) Tahun 2017.⁹⁵



Gambar diatas menyajikan presentasi populasi pengungsi di Australia pada tahun 2017 yang hampir setengah dari semua pengungsi adalah perempuan atau anak perempuan dan sekitar setengahnya dari populasi pengungsi adalah anak-

⁹⁴ Bbc News, Imigran Pencari Suaka Rusuh di Pulau Christmas, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110318_asyulumriot Pada Tanggal 24/09/2018 Pukul 11:45 Pm

⁹⁵ The UN Refugee Agency, diakses melalui <http://www.unhcr.org/globaltrends2017/> Pada Tanggal 24/09/2018 Pukul 12:22 PM

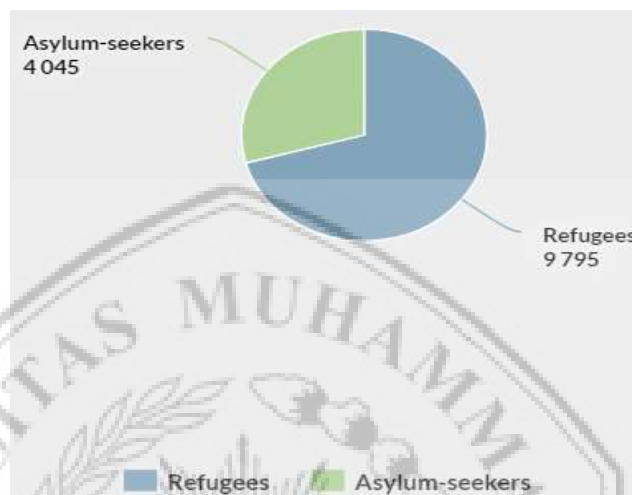
anak yang lebih tinggi daripada yang lain. Afrika memiliki persentase populasi penghuni anak-anak yang sangat tinggi, yaitu 59 persen.⁹⁶

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis di antara 2 benua (Hindia dan Pasifik) dengan garis pantai yang panjang dan sulit dikontrol oleh aparat dengan peralatan yang terbatas sehingga sering digunakan para imigran gelap untuk masuk ke Australia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan transnasional salah satunya adalah imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayah Indonesia sulit diawasi dari masuknya para imigran ilegal dari berbagai negara, terutama melalui jalur laut. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan baik. Pulau-pulau terpencil di Indonesia menjadi sasaran utama para imigran gelap untuk sampai ke wilayah kepulauan ini secara ilegal. Pelabuhan laut menjadi tempat yang mayoritas mereka lalui dalam perjalanan transitnya menuju negara tujuan mereka. Salah satunya Sumatera yang dekat dengan Malaysia, menjadi target utama transit para imigran gelap, karena sangat mudah dicapai sebelum mereka bisa sampai ke negara tujuan akhir yang menjadi incaran para imigran gelap yakni Australia. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, terutama di bagian yang paling mudah untuk dicapai, menyediakan pilihan yang banyak bagi pendaratan para imigran gelap.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Poltak Partog I Nainggolan, 2010, *Imigran Gelap Di Indonesia Masalah Dan Penanganan*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 15, No 1, hlm 122

Gambar 2.16 Populasi Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia
Menurut UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) Tahun
2017.⁹⁸



Gambar diatas menyajikan jumlah para imigran gelap yang juga menjadi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada tahun 2017. Data diatas diperoleh dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang mengemukakan bahwa pada tahun 2017 pencari suaka di Indonesia sekitar 4.045 orang dan pengungsi berjumlah 9.795. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara favorite para imigran gelap untuk melakukan transit ataupun menetap di Indonesia.⁹⁹

2.3 Kesepakatan Kerja Sama Indonesia dan Australia Bidang Maritim **(*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018**

⁹⁸ The Un Refugee Agency, diakses melalui <http://reporting.unhcr.org/node/10335> Pada Tanggal 24/09/2018 Pukul 1:31 PM

⁹⁹ *Ibid*

Terpilihnya Joko Widodo yang juga dikenal sebagai Jokowi pada Oktober 2014, ada pemikiran terbaru Jokowi yakni menjadikan kembali Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan wilayah maritim memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai seorang presiden, Jokowi membuka percakapan tentang pentingnya wilayah maritim bangsa dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Jokowi memperkenalkan visinya dengan mengubah Indonesia menjadi 'Poros Maritim Dunia' yang dituangkan kedalam lima pilar. Dalam mendukung kebijakan Jokowi, Indonesia melakukan kerja sama bilateral yang salah satunya adalah kerja sama bidang maritim dengan Australia.¹⁰⁰

Indonesia sebagai negara kepulauan, identitas dan kemakmuran Indonesia bergantung pada laut dan eksistensi Indonesia bergantung pada kemampuan negara dalam mempertahankan diri dari berbagai pengaruh eksternal maupun internal. Asumsi-asumsi dasar seperti inilah yang membentuk dasar kebijakan luar negeri Joko Widodo yang berfokus pada Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai negara dari 17.000 pulau, Jokowi menekankan masyarakat Indonesia harus sadar akan potensi maritim yang dimiliki sehingga dengan potensi tersebut dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia.¹⁰¹

Awal masa kampanyenya Presiden Joko Widodo menekankan pembahasan tentang isu-isu maritim serta berfokus pada kebijakan ekonomi yang

¹⁰⁰ Natalie Sambhi, 2015, *Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing Or Rocky Seas Ahead*, Journal Security Challenges Vol 11, No 2, hlm 39-55

¹⁰¹ Aaron L. Connelly, 2015, *Sovereignty And The Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges*, Jurnal Contemporary Southeast Asia Vol 37, No 1, hlm 6-7

lebih luas serta meningkatkan kegiatan ekonomi pembangunan untuk pulau-pulau terpencil. Pada kampanye selanjutnya Joko Widodo, berfokus pada Poros Maritim Dunia, yang menjadi salah satu slogan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.¹⁰²

Pada Juni 2014 Joko Widodo mengumumkan kembali tekadnya untuk mengubah Indonesia menjadi Poros Maritim Global. Ia menegaskan kembali visinya setelah dinyatakan menang dalam pemilu tahun 2014 dan menyerukan kepada semua warga masyarakat Indonesia untuk bekerjasama dalam mengembangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Joko Widodo juga kembali menegaskan seruannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim pemngambilan sumpah jabatan untuk menjadi presiden ketujuh Indonesia pada 20 Oktober 2014. Selain itu, Joko Widodo juga melakukan berbagai kerja sama terutama dalam bidang maritim dengan negara-negara dalam lingkup ASEAN maupun negara-negara mitra kerja lainnya guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.¹⁰³

Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan luar negeri dan pertahanan baru untuk Indonesia. Konsep yang diciptakan oleh Presiden Joko Widodo diperlukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan luar negeri yang diterapkan Presiden Joko Widodo juga diharapkan dapat

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Hendra Manurung, 2014, *Joko Widodo National Leaderships On Indonesia World Maritime Policy*, diakses melalui <file:///e:/jurnal%20skripsi/maritim%20era%20jokowi.pdf> Pada Tanggal 07/09/2018 Pukul 12:59 PM

mengatasi ancaman-ancaman keamanan maritim dan meningkatkan kerja sama bilateral dengan mitra strategi dikawasan ASEAN.¹⁰⁴

Pada tahun 2017-2018 Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, menyepakati sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan berdasarkan poin-poin *MoU Joint Declaration on Maritime Cooperation* yakni rencana aksi kerja sama maritim (*Maritime Cooperation*). Kerja sama ini dilakukan dengan Australia yang merupakan negara tetangga terdekat dan mempunyai misi atau tujuan yang sama dalam sektor maritim sehingga memudahkan Indonesia dan Australia dalam melakukan kerja sama yang lebih efektif terutama dalam bidang maritim serta menjaga stabilitas keamanan dikawasan. Pendatangan kerja sama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 oleh delegasi dari masing-masing negara. Dalam perjanjian tersebut keamanan maritim menjadi fokus utama dalam upaya menangani ancaman-ancaman kejahatan di wilayah maritim kedua negara. Mengingat wilayah maritim Indonesia dan Australia marak terjadi kejahatan transnasional (*Transnational Crime*). Adapaun permasalahan perbatasan maritim tersebut antara lain, People Smuggling, Drugs Tracffiking, Human Tracffiking, Illegal Fishing, Terrorism dan Imigran Illegal.¹⁰⁵

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia semakin kompleks, terutama dalam bidang maritim dengan adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan yang bertajuk *Maritime Cooperation*. Berdasarkan *MoU Joint*

¹⁰⁴ Ristian Atriandi Supriyanto, 2013, *Australia-Indonesia: Towards A Maritim Strategic Partnership*, diakses melalui <https://www.files.ethz.ch/isn/172055/rsis1322013.pdf> Pada Tanggal 29/08/2018 Pukul 5:22 PM

¹⁰⁵ Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2018, *Indonesia-Australia Sepakat Kerja Sama Maritim*, diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/16/171711526/indonesia-australia-sepakati-kerja-sama-maritim> Pada Tanggal 02/09/2018 Pukul 2:07 PM

Declaration on Maritime Cooperation, Indonesia dan Australia konsisten dalam upaya menangani kejahatan transnasional (*Transnational Crime*). Sebagai negara yang cukup dekat, Indonesia dan Australia memiliki permasalahan-permasalahan dalam bidang maritime (*Transnational Crime*) yang relatif sama.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di perbatasan laut kedua negara antara lain Human Trafficking, Illegal Fishing, Illegal Imigrant, Drugs Trafficking, People Smuggling, dan Terrorism. Peningkatan kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam bidang maritim juga didorong oleh Kebijakan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang ingin mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim (Poros Maritim Dunia) yang tertuang kedalam lima pilar. Hal ini dilihat dari potensi maritim yang dimiliki Indonesia sehingga dengan potensi maritim tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara.¹⁰⁶

Berikut ini adalah tabel isi dan tujuan Nota Kesepahaman (MoU) *Joint Declaration on Maritime Cooperation* yang mendasari kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang maritim (*Maritime Cooperation*).

**Tabel 2.4 Isi dan Tujuan MoU (Memorandum Of Understanding)
Joint Declaration on Maritime Cooperation.¹⁰⁷**

¹⁰⁶ Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata Pada Tanggal 13/09/2018 Pukul 8:04 PM

¹⁰⁷ Joint Declaration On Maritim Cooperation Between The Government Of Australia And The Government Of The Republic Indonesia, diakses melalui

MoU (Memorandum Of Understanding)	Isi MoU (Memorandum Of Understanding)	Tujuan MoU (Memorandum Of Understanding)
<i>Joint Declaration on Maritime Cooperation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk melakukan perdagangan bebas, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku. 2. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan Australia berkomitmen untuk melakukan perdagangan bebas, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku. 3. Indonesia dan Australia berkomitmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk bekerjasama meningkatkan manajemen dan keberlangsungan hidup. 2. Untuk terus memperkuat kerjasama dalam memerangi kejahatan disektor perikanan. 3. Untuk mempromosikan pengembangan peningkatan infastruktur maritim dan konektivitas regional yang lebih besar untuk memfasilitasi perdagangan maritim, investasi, layanan dan pariwisata. 4. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dengan menghasilkan lapangan kerja baru melalui pengembangan kapasitas keterampilan. 5. Untuk bekerjasama memperkuat arsitektur keamanan maritim diwilayah kami, termasuk berbagi keamanan

<https://dfat.gov.au/geo/indonesia/documents/australia-indonesia-joint-declaration-maritim-cooperation.pdf> Pada Tanggal 31/08/2018 Pukul 1:44 PM

	<p>untuk mengatasi tantangan atau ancaman kejahatan transnasional yang ada di laut</p>	<p>yang relevan dengan pemeliharaan keamanan maritim</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Untuk bekerjasama termasuk melalui mekanisme bilateral dan regional, untuk meningkatkan keselamatan maritim dan memperkuat komitmen dan upaya mereka dalam mencegah dan menanggapi ancaman lingkungan yang disebabkan oleh polusi di lingkungan laut. 7. Untuk meningkatkan pencarian dan penyelamatan, koordinasi dan komunikasi serta meningkatkan kemampuan dalam merespon isiden maritim dilaut kami. 8. Untuk mempromosikan pelabuhan dan kapal keamanan peraturan lingkungan aman. 9. Untuk memperkuat angkatan laut termasuk melalui kegiatan koperasi. 10. Untuk membangun kerjasama yang lebih era tantara kami maritim sipil.
--	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>11. Untuk memerangi kejahatan lintas negara melalui kerjasama yang lebih erat dan berbagi informasi antara penegak hukum dan keadilan.</p> <p>12. Untuk membangun kerjasama lebih lanjut dalam bidang kelautan.</p> <p>13. Untuk memperkuat kerjasama Pendidikan dan penelitian wilayah maritim, Lembaga ilmu pengetahuan, keselamatan dan keamanan, serta pembangunan ekonomi biru.</p> <p>14. Bekerjasama untuk memperkuat kerjasama dibidang warisan budaya maritim.</p> <p>15. Untuk bekerjasama dalam regional dan multilateral dan berkomitmen untuk mempromosikan kepentingan maritim bersama.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isi MoU *Joint Declation on Maritim Cooperation* diatas yang mendasari adanya kerja sama maritim yang dilakukan antara Indonesia dan Australia (*Maritime Cooperation*). Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya Indonesia dan Australia untuk terus menjaga hubungan bilateral kedua negara. Mengingat

Indonesia dan Australia memiliki misi yang sama dalam sector maritim. Wilayah maritim Indonesia dan Australia memang menjadi jalur utama perdagangan internasional, sehingga keamanan maritim sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) terutama dari Human Trafficking, Illegal Fishing, Imigran Illegal, Drugs Trafficking, People Smuggling, dan Terrorism.

Kerja sama *Maritime Cooperation*, memiliki 9 poin penting kerja sama yang disepakati berdasarkan MoU dari kerja sama tersebut yaitu Pengembangan ekonomi, konektivitas maritim dan *Blue Economy*. Memperkuat pertahanan maritim, memberantas kejahatan transnasional yang berlangsung di perairan Indo Pasifik. Memberantas penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing). Meningkatkan keamanan maritim, mencegah serta merespons polusi lingkungan maritim. Meningkatkan koordinasi dan manajemen resiko bencana maritim. Kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor maritim. Manajemen berkelanjutan dalam sumber daya maritim dan blue carbon. Pengelolaan warisan budaya maritim. Memperkaya kegiatan dialog baik skala regional maupun multilateral forum.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Aditya Mardiasuti, 2018, *Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia> Pada Tanggal 28/08/2018 Pukul 1:07 PM